PERAN POLITIK KIAI

(Studi tentang Peran Politik KH. Mahfudz Yasir di Desa Sarirogo Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo)

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Ilmu Sosial (S. Sos.) dalam Bidang Sosiologi

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

Oleh:

LUVIANA
NIM: BO5207031

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS: X D.2012 002 1
No. REG : D.2012/605/02
ASAL BUKU :
TANGGAL :

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

FAKULTAS DAKWAH

PROGRAM STUDI SOSIOLOGI

FEBRUARI 2012

PERNYATAAN

PERTANGGUNGJAWABAN PENULISAN SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Luviana

NIM : BO5207031

Program Studi : Sosiologi

Alamat : Pondok Mutiara, Blok BR 02, RT 26/27 Desa Banjarbendo Sidoarjo

Judul : Peran Politik Kiai (Studi tentang Peran Politik KH. Mahfudz Yasir di Desa Sarirogo Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo).

Menyelesaikan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi ini tidak pernah dikumpulkan kepada lembaga pendidikan mana pun untuk mendapatkan gelar akademik apapun.
2. Skripsi ini adalah benar-benar hasil karya saya secara mandiri dan bukan merupakan hasil plagiasi atas karya orang lain.
3. apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini sebagai hasil plagiasi, saya bersedia menanggung segala konsekwensi hukum yang terjadi.

Surabaya 27 Februari 2012

menyatakan,

METERAI TEMPEL

2A57AAAF987481719

ENAM RIBU RUPIAH

6000 DJP

LUVIANA

NIM: BO5207031

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Luviana ini telah diperiksa dan disetujui

Oleh dosen pembimbing untuk diujikan.

KEMENTERIAN AGAMA
PERPUSTAKAAN
SURABAYA
IAIN SUNAN AMPEL

Surabaya, 30 januari 2012

Pembimbing,

Iva Yulianti Umdatul Izzah, M. SI
NIP: 197607182008021022

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi yang ditulis oleh Luviana telah dipertahankan di depan

Tim Penguji Skripsi

Surabaya, 27 Februari 2012

Mengesahkan,

Institut Agama Islam Negeri Suanan Ampel

Fakultas Dakwah

Dekan,

Dr. H. Aswadi, M.Ag
NIP: 196004121994031001

Ketua

Iva Yulianti Umdatul Izzah, S.Sos., M.Si.
NIP: 197607182008021022

Sekretaris

Abid Rohman. S.Ag, M.Pd.I
NIP: 197706232007101006

Penguji 1

Prof. Dr. H. Shonhadji Sholeh, Dip.Is
NIP: 194907281967121001

Penguji 2

Husnul Mutaqin. S.Ag, S.Sos., M.Si.
NIP: 197801202006041003

Please purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark.

ABSTRAK

Luviana: Peran Politik Kiai (Studi tentang Peran Politik KH. Mahfudz Yasir di Desa Sarirogo Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo)

Kata Kunci: Peran, Politik Kiai

Fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini yaitu 1. Bagaimana peran politik KH. Mahfudz Yasir di Desa Sarirogo Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo?. 2. Bagaimana KH. Mahfudz Yasir menempatkan agama dalam peran politiknya di Desa Sarirogo Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo.

Untuk mengidentifikasi permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan paradigma definisi sosial dengan pisau analisis teori struktural fungsional dan teori aksi. Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif dalam menguraikan, menjelaskan dan menganalisa dakwah KH. Mahfudz Yasir dalam politik di Desa Sarirogo Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo. Sedangkan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan observasi, interview, dan dokumentasi.

Dan pada akhir penelitian ini, disimpulkan bahwa (1) KH. Mahfudz Yasir memiliki peran yang sangat berarti dalam politik di Desa Sarirogo-Sidoarjo. Peran politik beliau setidaknya dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu: *pertama*, peran politik formal yang beliau sebut sebagai peran struktural. Dalam hal ini kiai berperan serta dalam setiap kegiatan dan program-program politik, termasuk juga program partai, seperti kampanye, rapat, dan mengikuti setiap pemutusan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah.

(2). Antara agama dan politik menurut KH. Mahfudz Yasir tidak bisa pisahkan walaupun keduanya adalah hal yang berbeda. Keduanya harus dijalankan secara seimbang, karena keduanya adalah sistem yang terpadu. Apabila ada ketidakseimbangan antara keduanya maka akan terjadi ketidakseimbanga dalam aplikasi riil di masyarakatnya. Berkaitan dengan itu, menurutnya, agama adalah landasan moral bagi politik. Artinya, semua rencana dan program politik harus tetap didasarkan pada norma dan nilai agama, sehingga tujuan politik selaran dengan tujuan agama itu sendiri, *amar ma'ruf nahi mungkar*, meciptakan keadilan dan keharmonisan hidup masyarakatnya.

Sebagai saran akhir, bahwa penelitian ini masih hanya terbatas pada pembahasan tentang peran politik KH. Mahfudz Yasir, bukan yang lainnya. Oleh karena itu, penulis menyarankan ada pembahasan yang lebih lengkap dan komprehensif dari penelitian yang penulis tulis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Please purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

PENGESAHAN TIM PENGUJI iii

HALAMAN MOTTO iv

PERSEMBAHAN v

PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN vi

ABSTRAK vii

KATA PENGANTAR viii

DAFTAR ISI x

DAFTAR TABEL xiv

DAFTAR GAMBAR xv

BAB I : PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 5

C. Tujuan Penelitian 6

D. Manfaat penelitian 6

E. Definisi Konseptual 7

F. Metode penelitian 13

G. Sistematika Pembahasan 24

BAB II : KAJIAN TEORI 26

A. Kajian Pustaka 26

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Please purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark.

1. Tinjauan Umum peran politik kiai 26

a. Pengertian peran 26

b. Definisi politik 29

c. Kiai; Sebuah Definisi 33

1. Syarat Non-Formal disebut Kiai 35

2. Politik Kiai 36

a. Politik Kiai dalam Lintasan Sejarah 36

b. Prinsip Politik Kiai 38

c. Etika Politik Kiai 39

d. Orientasi Politik Kiai 40

3. Peran Politik Kiai 42

4. Agama dan Politik kiai 42

B. Kerangka Teoritik 46

C. Penelitian Terdahulu yang Relevan 50

BAB III : PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA 53

A. Setting Penelitian 53

1. Gambaran Umum Desa Sarirogo 53

a. Letak Geografis 54

b. Gambaran Sosial Desa Sarirogo 55

1) Gambaran perekonomian dan Pencaharian 55

2) Gambaran Pendidikan 57

3) Data Penduduk 58

4) Gambaran Kultural 58

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Please purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark.

5) Gambaran Keagamaan Masyarakat 59

B. Deskripsi Hasil Penelitian 60

1. Biografi KH. Mahfudz Yasir 60

a. Kelahiran KH. Mahfudz Yasir 60

b. Pendidikan KH. Mahfudz Yasir 61

c. KH. Mahfudz Yasir Masuk dalam Politik 63

d. Peran Politik KH. Mahfudz Yasir 66

e. Relasi agama dan politik menurut KH. Mahfudz 67

C. Analisis Data 72

1. Analisis atas Peran Politik KH. Mahfudz Yasir 72

2. Analisis terhadap pemikiran KH. Mahfudz Yasir tentang posisi agama dalam pandangan politik beliau 76

BAB V : PENUTUP 79

A. Kesimpulan 79

B. Saran-Saran 80

DAFTAR PUSTAKA 81

Lampiran-lampiran 84

1. Surat Keterangan (bukti melakukan penelitian)

2. Biodata Penulis

3. Foto-foto dokumentasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Please purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark.

DAFTAR TABEL

Tabel I: Batas-Batas Desa Sarirogo 14

Tabel II: Orbitasi Desa Sarirogo 14

Tabel III : Nama-nama Informan 17

Tabel IV: Batas-Batas Desa 54

Tabel V: Jarak Tempuh Desa 55

Tabel VI: Mata Pencaharian Masyarakat Sarirogo 56

Tabel VII: Pendidikan Penduduk Sarirogo 57

Tabel VI: Agama Penduduk Sarirogo 60

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Please purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark.

DAFTAR GAMBAR

Gambar I: 84

Gambar II: 85

Gambar III: 85

Gambar IV: 86

Gambar V: 86

Gambar VI: 87

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Please purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dalam masyarakat Islam, kiai merupakan salah satu elit yang mempunyai kedudukan sangat terhormat dan berpengaruh besar pada perkembangan masyarakat tersebut. Kiai menjadi salah satu elit strategis dalam masyarakat karena ketokohannya sebagai figur yang memiliki pengetahuan luas dan mendalam mengenai ajaran Islam.[1]

Lebih dari itu, secara teologis ia juga dipandang sebagai sosok pewaris para Nabi (*waratsatu al-anbiya*). Tidak mengherankan jika kiai kemudian menjadi sumber legitimasi dari berbagai keagaman, tapi juga hampir dalam semua aspek kehidupannya. Pada titik inilah penulis dapat melihat peran-peran strategis kiai, khususnya dalam aspek kehidupan sosial politik di Indonesia.

Oleh karena itu, perbincangan seputar peran politik kiai yang tumbuh dan berkembang khususnya pada masyarakat Indonesia, akan selalu melibatkan persinggungan wacana antara agama dan politik. Selain itu, kenyataan emperik juga mengilustrasikan perpaduan antara agama dan politik ini seperti terlihat pada peran-peran yang dimainkan sejumlah kiai dalam panggung politik praktis, paling tidak selama beberapa dekade terakhir.[2]

Terkait dengan masuknya kiai dalam politik tersebut menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Di satu fihak, ada masyarakat yang bersepakat

---

[1] Imam Suprayago, *Kyai dan Politik di Pedesaan (suatu kajian tentang Variasi dan bentuk Keterlibatan Politik Kyai).* Desertasi Doktor di Universitas Airlangga. 1997, hal: 23

[2] Bahtiar Effendi, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, Jakarta: Paramadina, 1998, hal: 126

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Please purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark.

dengan partisipasi kiai dalam politik. Dengan berkeyakinan bahwa kiai akan dengan mudah memperbaiki kehidupan masyarakat sekaligus kondisi politik itu sendiri. Kedekatan kiai dengan masyarakat dapat menjadi bekal bagi mereka untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat bawah yang akhir-akhir ini sudah mulai diabaikan oleh pemerintah (politisi). Tapi di sisi yang berbeda, ada juga masyarakat yang kurang setuju dengan partisipasi politik kiai. Fihak ini meyakini bahwa kiai lebih baik 'duduk' di pesantren dan mengurusi keagamaan umat (masyarakat).[3]

Terlepas dari perbedaan tersebut, kenyaatan dan fenomena yang terjadi adalah kiai sering kali menjadi lahan sasaran para politisi dalam membangun basis dukungan politik. Pada setiap Pemilihan Umum (Pemilu) maka suara kiai dan santri selalu diperebutkan bukan saja oleh partai-partai politik berbasis Islam saja melainkan juga partai-partai politik berbasis nasionalis. Dalam upaya meraup simpati dari kalangan Islam yang menjadi pengikut setia kiai, banyak partai politik yang menempatkan kiai dan tokoh pesatren pada jajaran pengurus partai dengan harapan dapat menjadi penarik massa dalam pemilu.[4]

Dengan demikian, tidak salah jika kemudian Nur Syam menilai bahwa kiai yang ikut terlibat dalam politik cenderung lebih banyak di manfaatkan oleh para elit politik lainnya. Hal itu didasarkan pada kenyataan bahwa kiai dalam partai politik lebih dikendalikan oleh sistem partai yang dibangun sebelumnya. Artinya, kiai lebih cenderung ikut pada 'pandangan' partainya bukan pada pandangan dirinya sendiri, walaupun itu bertentangan dengan hati nuraninya.

---

[3] Pradjarta Dirdjosanjoto, *Memelihara Umat: Kyai Pesantren-Kyai Langgar di Jawa*. Yogyakarta: LKiS, 1999, hal: 76

[4] Maskuri Abullah, *Ulama dan Politik*, , Jakarta: Kompas Media, 2000, hal: 122

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Please purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark.

Pada saat yang sama, Nur Syam dalam tulisannya menilai bahwa partisipasi politik kiai bersifat problematis; strategis di satu sisi dan dilematis di sisi yang lainnya. Secara lebih jelas beliau mengatakan bahwa peran kiai sangat strategis tetapi juga dilematis. Sebagai elit politik, sesuai dengan paham *Sunni*, kiai wajib mentaati pemerintah. Sebagai elit agama, kiai mempunyai kewajiban untuk menegakkan nilai-nilai agama dengan cara *amar makruf nahi munkar*. Pada waktu itu juga, kiai sebagai penafsir ajaran agama yang pandangan dan pemikirannya menjadi referensi masyarakatnya.

Sebagai elit sosial, kiai menjadi panutan dan sekaligus pelindung masyarakat dari tindakan kesewenang-wenangan pemerintah. Multi peran seperti inilah yang seringkali menjadikan kiai bersikap serba salah dan dilematis. Peran dan tanggung jawab kiai terhadap agama, negara dan masyarakat secara bersamaan, tidak jarang menimbulkan benturan kepentingan yang menjadikan pada posisi sulit.

Pada saat hubungan pemerintah dengan rakyat tidak harmonis, di mana dominasi negara sangat kuat, kiai yang tidak membela dan memperjuangkan kepentingan masyarakat akan dijauhi oleh masyarakat dan santrinya. Hal ini berarti kiai akan kehilangan sumber otoritas, kewibawaan dan legitimasi sebagai kiai, yang apabila tidak diatur dengan baik, kiai akan kehilangan posisi daya tawarnya, tidak hanya di hadapan pemerintah, tetapi di hadapan masyarakat.[5]

Namun demikian, Hiroko mengatakan bahwa kiai dalam partai politik memiliki kontribusi pada perjalanan politik di sebuah Negara. Lihat saja yang

---

[5] Lihat tulisan Prof. Dr. Nur Syam, *Kiai, Santri dan Politik*, di nursyam.sunan-ampel.ac.id. Diunduh pada tanggal 15 Februari 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Please purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark.

terjadi di Indonesia beberapa tahun terakhir, para kiai yang masuk ke dalam politik (praktis) sedikit banyak merubah wajah perpolitikan kita. Dia menyontohkan adanya relasi politik dengan dakwah. Adanya relasi tersebut baru ada ketika politik dimasuki oleh para kiai.[6]

Terlepas dari perbedaan tersebut, penelitian ini akan membahas tentang peran kiai dalam politik, dengan mengambil objek kajian KH. Mahfudz Yasir yang berdiam di Desa Sarirogo Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo. KH. Mahfudz Yasir adalah salah satu sosok yang bisa dikategorikan sebagai kiai sekaligus politisi. Beliau merupakan sosok yang turut berjasa dalam perpolitikan yang terjadi di desa Sarirogo khususnya dan di Sidoarjo pada umumnya.

Pada tahun 1993, KH. Mahfudz Yasir masuk dalam politik, tepatnya partai persatuan pembangunan (PPP). Kemudian pada tahun 1998, beliau bersama beberapa kiai lainnya bergabung denga partai baru NU yaitu partai kebangkitan bangsa (PKB), dan terakhir beliau masuk ke partai kebangkitan nasional ulama (PKNU) bersama beberapa kiai di desa tersebut.[7]

Dalam beberapa partai tersebut KH. Mahfudz Yasir memiliki peran andil dalam lakon politik. Menurut beliau, Kiai selalu diminta pendapatnya dalam pengambilan keputusan partainya. Sebut saja dalam pemerintahan desa, peraturan atau etika sangat bergantung pada pendapat kiai. Contohnya peraturan pelarangan pendirian tempat hiburan yang dapat merusak akidah uamat, tempat hiburan malam seperti bar, diskotik, tempat perjudian, minuman keras, tempat pelacuran dan lain semacamnya.

---

[6] Hiroko Horikoshi, *Kyai dan Perubahan Sosial*, Jakarta: LP3ES, 1987, hal: 193

[7] Hasil bincang –bincang santai dengan KH. Mahfudz Yasir pada tanggal 22 November 2011 pada jam 03.45 WIB.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Please purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark.

Di samping itu, politik kiai Mahfudz sangat erat kaitannya dengan dakwah. Menurut beliau, politik yang dilakoninya dijadikan sebagai media dakwah di samping juga menjadi media untuk membangun kehidupan umat yang lebih baik. Dalam hal ini, jelas bahwa KH. Mahfudz lebih cenderung memadukan antara politik (Negara) yang profan dan agama yang sakral.[8]

Lebih jelasnya, menurut beliau berperan serta dalam politik dewasa ini memiliki peran strategis karena dapat berpartisipasi langsung untuk mengurusi pemerintahan Negara sekaligus media menyebarkan nilai-nilai agama kepada masyarakatnya.

Penelitian ini secara *concern* akan membahas tentang peran politik KH. Mahfudz Yasir utamanya terkait dengan peran politik beliau dan bagaimana beliau dapat memposisikan agama dalam dunia politiknya sehingga dapat dengan jelas antara agama dan politik. Karena sebagaimana yang isu yang bergulir pada saat ini, ada sebagian yang setuju bahwa agama dan politik dapat dikompromikan dan ada pula yang kurang setuju karena agama dengan politik adalah sesuatu yang berbeda.

B. Rumusan Masalah

Dari paparan latar belakang di muka, penulis merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran politik KH. Mahfudz Yasir di Desa Sarirogo Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo?

[8] Hasil wawancara dengan KH. Mahfudz Yasir pada tanggal 21 November 2011, jam 04.12 WIB.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Please purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark.

2. Bagaimana KH. Mahfudz Yasir menempatkan agama dalam pandangan politiknya di Desa Sarirogo Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana peran politik KH. Mahfudz Yasir di Desa Sarirogo Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo.
2. Untuk mengetahui bagaiamana KH. Mahfudz Yasir menempatkan agama dalam pandangan politiknya di Desa Sarirogo Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo.

D. Mafaat Penelitian

a. Bagi Akademik
   1. Dapat mengetahui bagaimana peran dan bagaimana KH. Mahfudz Yasir menempatkan agama dalam politik.
   2. Dapat memberikan analisis terhadap masalah politk dan kiai dengan menggunakan teori yang relevan.

b. Bagi Masyarakat
   1. Masyarakat dapat mengetahui apa peran politik KH. Mahfudz Yasir di Desa Sarirogo Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo .
   2. Masyarakat dapat menelaah lebih lanjut tentang politik kiai dan peranan mereka di Desa Sarirogo Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Please purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark.

c. Bagi Penulis

1. Penulis dapat mejalankan salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pengabdian terhadap masyarakat.
2. Penulis dapat menerapkan teori-teori yang sudah diperoleh dari perkuliahan sebagai analisis masalah dalam penelitian.

E. Definisi Konseptual

1. Peran

Dalam kamus bahasa indonesia, peran diartikan sebagai fungsi atau andil[9] atau bisa juga bermakna sumbangsih. Sedangkan dalam konteks politik, kata peran sering kali diartikan sebagai partisipasi seorang tokoh (kiai) dalam partai politik[10], yang tentunya tidak terlepas dari peran serta dan andil mereka di dalamnya. Sama dengan itu, Suhaidi mengartikan peran politik kiai sebagai masuknya seorang kiai dalam partai politik tertentu dimana kiai tersebut kemudian mengikuti aturan, rencana dan program yang dilakukan oleh partai itu.[11]

Peran dalam kajian ini disandarkan pada pada politik dan kiai, yang berarti partisipasi politik kiai dalam kegiatan politik yang berlangsung, baik itu berbentuk rencana, saran, kritik, kegiatan maupun partisipasi dalam bentuk lainnya. Biasanya, peran di sini dilihat secara formal maupun secara tidak formal.

---

[9] Tim Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, Surabaya: Arkola, 1997, hal: 480
[10] Ahmad Patoni, *peran Kiai Pesantren dalam Partai Politik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007, hal: 13.
[11] Suhaidi RB, *Menelisik Peran Politik Kiai*, Majalah Turas, 1999, hal: 46

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Please purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark.

2. Politik

Dalam bahasa Arab, politik disebut "*siyasah*". Politik itu sendiri berarti cerdik dan bijaksana. Pada dasarnya politik mempunyai ruang lingkup negara. Karena teori poltik menyelidiki negara sebagai lembaga politik yang mempengaruhi hidup masyarakat, jadi negara dalam keadaan bergerak. Selain itu politik juga menyelidiki ide-ide, asa-asa, sejarah pembentukan negara, hakikat negara serta bentuk dan tujuan negara, disamping menyelidiki hal-hal seperti pressure group, interest group, elit politik, pendapat umum (*publik opinion*), peranan patai politik dan pemilihan umum.

Ramlan Surbakti menginventarisasi bahwa hingga perkembangan yang terakhir ada sekurang-kurangnya lima pandangan mengenai politik. *pertama,* politik ialah usaha-usaha yang ditempuh warga negara untuk membicarakan dan mewujudkan kebaikan bersama.

Kedua, politik sebagai segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan. *Ketiga,* politik sebagai segala kegiatan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat. *Keempat,* politik sebagai kegiatan yang berkaitan dengan perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum. *Kelima,* poltik sebagai konflik dalam rangka mencari dan atau mempertahankan sumber-sumber yang dianggap penting.[12]

Para ilmuwan politik kontemporer berpandangan bahwa politik ialah proses pembuatan keputusan dan pelaksanaan keputusan-keputusan yang mengikat bagi suatu masyarakat. Perilaku politik berarti suatu kegiatan yang

[12] Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Grasindo, 1992, hal: 8

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Please purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark.

berkenaan dengan proses dan pelaksanaan keputusan politik dan yang melakukan kegiatan tersebut ialah pemerintah dan masyarakat. Warga negara memang tidak memiliki fungsi menjalankan pemerintahan, tetapi mereka memiliki hak untuk mempengaruhi orang yang menjalankan fungsi pemerintahan itu.[13]

Politik dalam makna yang lebih luas, menurut adalah koordinasi usaha-usaha serta pengharapan-pengharapan manusia yang dapat diandalkan untuk mencapai tujuan masyarakat. Mirip dengan itu, menyatakan politik sebagai perangkat-perangkat tertentu yang bertalian dan diperlukan untuk mengupayakan pemenuhan kebutuhan masyarakat guna mencapai tujuan, atau menentukan tujuan bersama.[14]

Menurut Antony Black dalam pengantar bukunya menyebutkan bahwa politik adalah suatu kebijaksanaan untuk mengatur suatu pemerintahan yang berdaulat atau masyarakat dalam bernegara.[15]

Dalam bahasa yang sederhana Muhammad Dhiauddin menandaskan bahwa politik secara sederhana adalah segala hal yang berkaitan dengan permainan kekuasaan. Sebagai seorang politikus, pekerjaannya hanya dua: menghimpun kekuasaan (*machtvorming*) dan menggunakan kekuasaan (*machtaanwending*).

Ketika seseorang rajin mengunjungi orang-orang yang berpengaruh dan melakukan negosiasi dengan mereka, maka sesungguhnya dia sedang

---

[13] Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2008, hal: 7
[14] Ibid, hal: 9
[15] Antony Black, *Pemikiran Politik Islam; dari Masa Nabi hingga Kini*, Jakarta: Serambi Ilmu, 2006, hal: xi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Please purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark.

menghimpun kekuasaan. Dan ketika seseorang menyingkirkan lawannya dengan memanipulasi wewenang yang dimilikinya, maka diapun sesungguhnya sedang menggunakan kekuasaannya.[16]

Dalam sebuah karya yang berjudul *Pengantar Kepemikiran Politik* "Daliar Noer" menyebutkan bahwa perkataan politik mengandung berbagai makna yang sangat luas yakni kekuasaan, kekerasan, wibawa, hubungan dua pihak, perasaan dan keinginan, kepentingan, nilai, keyakinan dan agama, milik, status, kelas, tujuan, ideologi. Akan tetapi dari sekian arti atau makna tersebut ia lebih mendasarkan kesemuanya itu pada makna kekuasaan. Karena makna ini dapat mencover makna-makna tersebut dan bukan sebaliknya.[17]

3. Kiai

Menurut KH. Abdurrahman Wahid dalam buku *Memelihara Umat, Kiai Pesantren – Kiai Langgar di Jawa* istilah *kiai, bindere, nun, ajengan dan guru* adalah sebutan yang semula diperuntukkan bagi ulama tradisional di pulau Jawa, walaupun sekarang ini kiai digunakan secara generik bagi semua ulama, baik tradisional maupun modernis, di pulau Jawa maupun di luar Jawa. Istilah ustadz, yang dulunya menjadi tanda pengenal ulama modernis atau ulama kalangan masyarakat Arab di negeri kita, sekarang juga sudah masuk dalam lingkungan pondok-pondok pesantren. Memandang dunia keulamaan dari sudut pandangan terminologi yang digunakan seperti

[16] Muhammad Dhiauddin, *Teori Politik Islam*, Jakarta: Gema Press Insani, 2001, hal: 3-4
[17] Delier Noer, *Pengantar Ke Pemikiran Politik*, Cet.I, Jakarta: Rajawali, 1983, hal. 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Please purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark.

itu, itu saja sudah mengharuskan kita untuk melakukan pembagian para kiai berdasarkan macam-macam tolok ukur.[18]

Menurut asal-usulnya, perkataan kiai dalam bahasa Jawa dipakai untuk tiga jenis gelar yang saling berbeda :

1. Sebagai gelar kehormatan bagi barang-barang yang dianggap keramat; umpamanya, "Kiai Garuda Kencana" dipakai untuk Kereta Emas yang ada di Keraton Yogyakarta.
2. Gelar kehormatan untuk orang-orang tua pada umumnya;
3. Gelar yang diberikan oleh masyarakat kepada seorang ahli agama Islam yang memiliki atau menjadi pimpinan pesantren dan mengajar kitab-kitab Islam klasik kepada para santrinya. Selain gelar kiai, ia juga sering disebut seorang alim (orang yang dalam pengetahuan Islamnya).

Kebanyakan kiai di Jawa beranggapan bahwa suatu pesantren dapat diibaratkan sebagai kerajaan kecil dimana kiai merupakan sumber mutlak dari kekuasaan dan kewenangan *(power and authority)* dalam kehidupan lingkungan pesantren. Tidak ada seorang santripun atau orang lain yang dapat melawan kekuasaan kiai (dalam lingkungan pesantrennya) kecuali kiai lain yang lebih besar pengaruhnya. Para santri selalu mengharap dan berpikir bahwa kiai yang dianutnya merupakan orang yang percaya penuh kepada

[18] Pradjarta Dirjosanjoto, *Memelihara Umat, Kiai Pesantren – Kiai Langgar di Jawa*, Jogjakarta: LKIs, 1991, hal: xiii

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Please purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark.

dirinya sendiri *(self confident)*, baik dalam soal-soal pengetahuan Islam maupun dalam bidang kekuasaan dan manajemen pesantren.[19]

Dalam *Shorter Encyclopedia of Islam* yang ditulis oleh H. A. R. Gibb dan J. H. Kramers, kiai itu sebagai ahli agama sering juga disebut sebagai "ulama", sebutan yang lebih umum dipakai di lingkungan masyarakat Islam. Ulama sendiri adalah bentuk plural (jamak) dari kata *'alimun* yang berarti orang yang mengetahui. Kata itu sangat lurmrah digunakan di negara Timur Tengah, seperti Arab Saudi dan yang lainnya.[20]

Kiai juga disebut sebagai "elit agama". Istilah elit berasal dari bahasa Inggris "*elite*" yang juga berasal dari bahasa Latin "*eligere*", yang berarti memilih. Istilah elit digunakan pada abad ke tujuh belas, untuk menyebut barang-barang dagangan yang mempunyai keutamaan khusus, yang kemudian digunakan juga untuk menyebut kelompok-kelompok sosial tinggi seperti kesatuan-kesatuan militer atau kalangan bangsawan atas.[21]

Dari beberapa definisi di atas maka penulis memberi batasan bahwa istilah kiai yang penulis maksudkan adalah gelar yang diberikan oleh masyarakat kepada seorang ahli agama Islam yang memiliki atau menjadi pimpinan pesantren dan mengajar kitab-kitab Islam klasik kepada para santrinya. Selain gelar kiai, ia juga sering disebut seorang alim (orang yang dalam pengetahuan Islamnya).

---

[19] Zamakhsyari Dofier, *Tradisi Pesantren*, Jakarta: LP3Es, 2008, hal: 93-94
[20] H.A.R Gibb dan JH Kramers, *Shorter Encydopaedia of Islam*, Cornell University Press, Ithaca, New York, 1953, hal: 559
[21] Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: Gramedia, 1994, hal: 24

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Please purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark.

F. Metode Penelitian

a. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Perlu ditegaskan di sini bahwa penelitian ini termasuk penelitian kualitatif karena data yang dihadapi berupa pernyataan verbal bukan nomerik atau angka-angka.[22] Oleh karena data dalam penelitian kualitatif adalah obyek yang alamiah maka penelitian ini juga sering disebut sebagai metode naturalistik.[23]

Jenis ini sangat sesuai dengan tema penelitian penulis karena penelitian kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisa fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran individu maupun kelompok. Penelitian ini membahas tentang peran politik kiai yang meruapakan aktivitas sosial yang terjadi di tengah masyarakat, khususnya desa Sarirogo-Sidoarjo. Lebih lanjut dikatakan bahwa beberapa deskripsi digunakan untuk menemukan prinsip dan penjelasan yang mengarah pada kesimpulan akhir.[24]

Sebagaimana dijelaskan oleh Nana Syaodih bahwa penelitian kualitatif memiliki dua tujuan. Oleh karenanya, penelitian ini juga memiliki dua tujuan yaitu (1) menggambarkan dan mengungkap dan (2) menggambarkan dan menjelaskan. Dengan kata lain bahwa penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan mengungkap fakta-fakta yang

---

[22] Noeng Muhadjir, *Motode Penelitian Kualitatif*, Jogjakarta: Rakesarsin, 1996, hal: 94
[23] Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV Alfabeta, 2009, hal: 1
[24] Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Rosda Karya, 2005, hal: 60

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Please purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark.

terkait dengan bagaimana peran serta dan partisipasi kiai dalam dunia politik.

b. Lokasi Penelitian

Penelitian ini bertempat di Desa Sarirogo Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo. Dalam penggalian data penulis mengmbil beberapa tempat sebagai fokus lokasi penelitian. Tempat yang akan penulis telaah sebagai wilayah sumber data yang sesuai adalah di Desa Sarirogo Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo dimana KH. Mahfudz Yasir berdiam, rumah para tokoh masyarakat serta rumah para warga di sekitarnya. Pengambilan objek penelitian ini karena Bapak Kiai merupakan orang yang cukup berpengaruh dalam masyarakatnya.

Secara simpel berikut penulis jelaskan tentang desa Sarirogo:

Tabel I: Batas-batas Desa Sarirogo

Batas	Desa/Kelurahan	Kecamatan
Sebelah utara	Kebonagung	Sukodono
Sebelah selatan	Cemeng Bakalan	Sidoarjo
Sebelah Barat	Urang Agung	Sidoarjo
Sebelah Timur	Anggaswangi	Sukodono

Tabel II: Dengan orbitasi sebagai berikut:

1	Jarak ke ibu kota kecamatan terdekat	6 km
2	Lama tempuh ke ibu kota kecamatan terdekat	0.25 jam
3	Jarak ke ibu kota kabupaten / kota terdekat	15 km
4	Lama tempuh ke ibu kota / kota terdekat	0.45 jam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Please purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark.

Adapun letak kediaman KH. Mahfudz Yasir (yang menjadi objek dalam penelitian ini) yaitu di pondok pesantren Salafiyah Metal RT. 05 RW 01 Desa Sarirogo nomor 07 kabupaten Sidoarjo. Dengan begitu, perizinan terkait dengan penelitian ini yaitu mulai dari Bakesbang, Kepala Desa, dan dari KH. Mahfudz Yasir sendiri. Intinya, penelitian ini berlangsung di Desa Sarirogo sedangkan yang menjadi objek penelitiannya adalah peran politik KH. Mahfudz Yasir di Desa tersebut.

c. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data diperoleh. Apabila peneliti menggunakan angket atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik melalui lisan maupun tulisan. Sedangkan apabila peneliti menggunakan teknik observasi, maka sumber datanya bisa berupa benda, gerak atau proses sesuatu. Setidaknya ada tida sumber data secara umum, yaitu orang, tempat dan simbol (data-data tertulis dll).

Data merupakan salah satu komponen utama dalam proses pelaksanaan penelitian. Karena pembacaan dan analisis penulis didapatkan dari data yang telah diperoleh. *Lofland* dan *Lofland* menjelaskan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah *kata-kata* dan *tindakan*, selebihnya adalah tambahan seperti dokumen dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Please purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark.

lain-lain.[25] Oleh karenanya, deskripsi dan analisis dalam penelitian ini didasarkan pada kata-kata atau tindakan KH. Mahfudz Yasir, khususnya dan informan lain pada umumnya.

Dalam penelitian ini, penulis membagi menjadi dua sumber data sebagaimana disebutkan juga dalam penelitian kualitatif, yaitu:

1. Data primer

Data primer diperoleh dari informasi yang diberikan oleh informan yang bersangkutan. Dalam penelitian ini, yang menjadi informan adalah KH. Mahfudz Yasir selaku tokoh yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini (informan kunci/inti) yang berdiam di Desa Sarirogo dan anggota partai, 1 tokoh masyarakat, 2 anggota partai, dan 3 masyarakat awam yang ada di desa tersebut. Adapun nama-nama informan dimaksud adalah sebagaimana tabel berikut:

[25] Lexy Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2007, hal: 157.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Please purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark.

Tabel III: Informan Penelitian

No	Nama	Presentase	Keterangan
1	KH. Mahfudz Yasir	40 %	Tokoh masyarakat desa Sarirogo sekaligus elit politik
2	Ahmad Jazuli	15 %	Anggota partai PKNU sekaligus tokoh masyarakat
3	Rahman Khofi	15 %	Anggota partai PKB
4	Hasan al-Qadar	15 %	Putera KH. Mahfudz Yasir
5	Husnan Amar	5 %	Masyarakat
6	Inaroh	5 %	Masyarakat
7	Mustafa	5 %	Masyarakat
Jumlah Presentase		100 %	

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data dari hasil dokumentasi yang dilakukan oleh penulis seperti, hasil gambar, foto, profil desa dan lain sebagainya. Data ini sebagai pelengkap atau pendukung adanya data utama atau informasi yang telah diperoleh oleh penulis di lokasi penelitian yaitu Desa Sarirogo. Di samping itu, data sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku refrensi yang pembahasannya sesuai dengan tema penelitian ini, yaitu tentang peran politik kiai. Buku-buku ini dimaksudkan sebagai acuan atau barometer akan tema-tema yang ada dalam penelitian ini, utamanya dalam bab 2 yang merupakan kajian pustaka dan bab 4, analisis data hasil penelitian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Please purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark.

d. Tahap-tahap Penelitian

1. Tahap Pra-lapangan

Tahap pra lapangan ini meliputi penyusunan rancangan penelitian yaitu proposal lapangan, memilih lapangan penelitian, mengurus perizinan penelitian pada pihak yang terkait, menjajakan dan menilai keadaan lapangan (orientasi lapangan), memilih dan memanfaatkan informan sebagai sumber data yang akurat, menyiapkan perlengkapan penelitian baik perlengkapan fisik maupun non fisik, dan memahami etika penelitian. Etika penelitian ini menjadi sesuatu yang penting, sebab dalam penelitian kualitatif, manusia menjadi alat pengumpul data. Oleh karena itu, dia harus memahami peraturan, norma, dan nilai sosial masyarakat.

2. Tahap Pekerjaan Lapangan

Tahap pekerjaan lapangan ini meliputi, memahami latar penelitian, baik latar terbuka maupun latar tertutup, mempersiapkan diri untuk beradaptasi dengan sosiokultural masyarakat yang akan diteliti, memasuki lapangan, berbaur dengan masyarakat, berperan serta dan melibatkan diri, dalam kegiatan masyarakat sebagai langkah pengamatan, mendatangi para informan yang telah ditentukan untuk diwawancarai, mencatat dan mengumpulkan seluruh data yang diperlukan baik dari wawancara dan pengamatan dalam peran serta, mengklasifikasikan data pada tema yang sesuai, serta melakukan analisis sederhana dilapangan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Please purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark.

3. Tahap Analisis Data

Pada tahap analisis data, penulis sudah memperoleh dan mengumpulkan data yang diperoleh di lapangan. Setelah data terkumpul, dilakukan proses klasifikasi data. Pada proses ini pemilhan data dilakukan untuk menyesuaikan data sesuai kebutuhan. Karena dalam penggalian data akan tidak menutup kemungkinan dilakukan *depth interview* yang menghasilkan data sebanyak-banyaknya. Setelah data sudah terkumpul maka yang dilakukan adalah memilih teori yang sesuai untuk digunakan sebagai pisau analisis masalah yang sudah terungkap di lapangan. Teori dimaksud dijadikan sebagai acuan dalam membahas dan memecahkan data atau problema yang ditemukan di lapangan.

4. Tahap Penulisan Laporan

Penulisan laporan adalah tahap akhir dari proses pelaksanaan penelitian. Setelah semua komponen-komponen terkait dengan data dan hasil analisis data serta mencapai suatu kesimpulan, penulis mulai menulis laporan dalam konteks laporan penelitian kualitatif. Penulisan laporan disesuaikan dengan metode dalam penulisan penelitian kualitatif dengan tidak mengabaikan kebutuhan penulis terkait dengan kelengkapan data. Penulisan laporan ini disusun sesuai dengan (buku) panduan yang telah ditentukan oleh fakultas. Secara otomatis, data-data juga disesuaikan dengan panduan tersebut dengan tanpa mengurangi substansinya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Please purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark.

e. Teknik Pengumpulan Data

Pada peneltian dengan menggunakan pendekatan kualitatif maka teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara *observasi* (pengamatan), *interview* (wawancara), dan *dokumentasi*.

1. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan salah satu teknik yang dilakukan dalam pencarian data pada penelitian kualitatif. Pengamatan dilakukan dengan melihat kondisi maupun suasana ada pada fokus penelitian.[26]

Observasi dalam arti luas adalah peneliti secara terus menerus melakukan pengamatan atas perilaku seseorang. Sedang pengertian observasi yang lebih sempit adalah mengamati (*Watching*) dan mendengar (*Listening*) perilaku seseorang selama beberapa waktu tanpa melakukan manipulasi atau pengendalian, serta mencatat penemuan yang memungkinkan atau memenuhi syarat untuk digunakan ke dalam tingkat penafsiran analisis.[27]

Lebih lanjut, selama observasi berlangsung, penulis mampu memberikan gambaran awal tentang data yang akan digunakan sebagai bahan analisis masalah yang ada.

[26] Jumhur dkk., *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah*, Bandung: Pustaka Ilmu, 1975, hal: 51.
[27] James Black, *Metodologi dan Masalah Penelitian Sosial*, Bandung: Erecso, 1992, hal: 82

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Please purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark.

2. Interview

Interview atau wawancara adalah salah satu cara untuk memperoleh data dalam penelitian kualitatif. Wawancara dilakukan dengan subyek penelitian. Dalam proses wawancara, subyek penelitian atau informan harus jelas, dengan mengetahui bagaimana latar belakang informan tersebut.[28]

Pencarian informasi dengan cara wawancara terlebih dahulu ditentukan *key-informan* (informan kunci). Key-informan merupakan sumber data yang paling urgen dalam upaya pencarian data yang valid. Dalam penelitian ini yang menjadi objek inverview adalah KH. Mahfudz Yasir anggota partai sekaligus pengasuh pondok pesantren Salafiyah Metal, tokoh masyarakat, anggota partai PKNU, dan beberapa masyarakat yang ada di desa tersebut.

Sebagaimana Patton mengatakan bahwa wawancara atau interview dibagi menjadi beberapa macam. Dalam penelitian ini, pedoman wawancara juga berpedoman kepada apa yang dikatakan Patton tersebut. Pembagian tersebut yaitu:

a. Wawancara Pembicaraan informal: jenis ini merupakan wawancara yang bisa dikatakan tidak dipersiapkan sebelumnya oleh peneliti. Suasana wawancara ini biasanya berjalan secara simultan.
b. Wawancara formal/resmi: jenis ini lebih memperhatikan teknis. Dalam hal ini, pewawancara harus membuat kerangka atau garis

[28] Cholid Nurbuko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 1997, hal: 70.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Please purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark.

besar yang telah dirumuskan dalam bentuk pertanyaan yang disiapkan sebelumnya. Sehingga, jawaban objek tidak keluar jauh dari pertanyaan dimaksud. Biasanya, wawancara jenis ini berjalan dalam suasana yang formal atau resmi.[29]

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara pencarian data di lapangan yang berbentuk gambar, arsip dan data-data tertulis lainnya. penulis perlu mengambil gambar selama proses penelitian berlangsung untuk memberikan bukti secara real bagaimana kondisi dilapangan terkait permasalahan yang ada di masyarakat.[30]

Arsip-arsip dan data-data lainnya digunakan untuk mendukung data yang ada dari hasil observasi dan interview sekaligus menjadi penguat atas validitas data atau hasil penelitian nantinya.

f. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif ini, penulis menggunakkan teknik analisis deskriptif. Setelah data terkumpul baik dari data primer maupun sekunder, penulis menganalisis dalam bentuk deskripsi. Analisis deskripsi merupakan analisis yang dilakukan dengan memberikan gambaran (deskripsi) dari data yang diperoleh di lapangan. Dari data yang diperoleh di lapangan, langkah selanjutnya yaitu dianalisis dengan menggunakan teori yang sudah ditentukan.

---

[29] James Black, *Metodologi dan Masalah Penelitian Sosial*, hal: 102

[30] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005, hal: 231

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Please purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark.

g. Teknik Pemeriksaan Data

Dalam memeriksa keabsahan data, penulis dalam penelitian ini menggunakan trianggulasi. Di mana dalam pengertiannya, trianggulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian.[31] Dalam hal ini, penelusuran keabsahan data dilakukan dengan merujuk kembali pada fakta-fakta lain yang didapat setelah penelitian resmi telah selesai dilakukan.

Trianggulasi sendiri dapat dilakukan dengan menggunakan teknik yang berbeda yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Trianggulasi ini selain digunakan untuk mengecek kebenaran data juga dapat dijadikan sebagai alat untuk memperkaya data. Menurut Nasution, selain trianggulasi juga dapat berguna untuk menyelidiki validitas tafsiran seorang peneliti terhadap data, karena itu trianggulasi bersifat reflektif.[32]

Denzin dalam Moloeng membedakan empat macam trianggulasi di antaranya dengan memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori. Pada penelitian ini, dari keempat macam tersebut, penulis hanya menggunakan teknik pemeriksaan dengan memanfaatkan sumber. Dalam artian bahwa penulis akan membandingkan dan mengecek balik data yang terkumpul dengan fakta-fakta lain di lapangan yang terkait dengan tema yang dibahas.[33] Untuk mencapai hal tersebut ada beberapa langkah yang harus ditempuh. Langkah ini dilakukan untuk validitas data

[31] Lexy Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif* …hal: 330
[32] Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Bandung: Tarsito, 2003, hal: 115
[33] Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, hal: 336

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Please purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark.

akurasinya dengan temuan data lapangan sebelumnya. Langkah-langkah dimaksud di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
3. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan masyarakat dari berbagai kelas sosial.
4. membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan dengan tema penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

a. Bab I Pendahuluan

Dalam bab pendahuluan penulis memberikan gambaran tentang latar belakang masalah yang hendak diteliti. Setelah itu menentukan rumusan masalah dalam penelitian tersebut. Serta menyertakan tujuan dan manfaat penelitian.

b. Bab II Kajian Teori

Dalam bab kajian teori, penulis memberikan gambaran tentang definisi konsep yang berkaitan dengan judul penelitian, serta teori yang akan digunakan dalam menganalisa masalah. Definisi konsep harus

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Please purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark.

digambarkan dengan jelas. Selain itu harus memperhatikan relevansi teori yang akan digunakan dalam menganalisis masalah.

c. Bab III: Penyajian dan Analisis Data

Dalam bab penyajian data, penulis memberikan gambaran tentang data-data yang diperoleh, baik data primer maupun data sekunder. Penyajian data dibuat secara tertulis dan dapat juga disertakan gambar, tabel atau bagan yang mendukung data sekaligus sebagai bahan banding dengan data tertulis lainnya. Setelah itu, data-data tersebut akan dianalisis dengan menggunakan teori yang relevan yang telah ditentukan.

d. Bab IV: Penutup

Dalam bab penutup, penulis menuliskan kesimpulan dari permasalahan dalam penelitian selain itu juga memberikan rekomendasi kepada para pembaca laporan penelitian ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Please purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Pustaka

1. Tinjauan Umum Peran politik kiai

a. Pengertian Peran

Dalam pengertiannya, peran (*role*) adalah sesuatu yang diharapkan yang dimiliki oleh individu yang mempunyai kedudukan lebih tinggi dalam kehidupan masyarakat.[34] peran erat kaitannya dengan status, [35] dimana di antara keduanya sangat sulit dipisahkan. Soekanto melanjutkan bahwa peran adalah pola perilaku yang terkait dengan status. Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa peran adalah aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan kewajiban sesuai dengan kedudukan maka ia menjalankan suatu peran.

Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah hanya sebatas kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak bisa dipisahkan karena keduanya memiliki kesamaan yang saling berkaitan. Tidak ada peran tanpa adanya kedudukan dan begitu juga tidak ada kedudukan yang tidak mempunyai peran di masyarakat secara langsung.[36]

Setiap orang mempunyai peranan masing-masing dalam kehidupannya sesuai dengan pola lingkungan hidupnya. Hal ini berarti bahwa peranan

---

[34] Peter Salim dan Yeni Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Press, 1991, hal: 1132
[35] Soerjono Soekanto, *Memperkenalkan Sosiologi*, Jakarta: Rajawali, 1982, hal: 33
[36] Ralph Linton, *Sosiologi suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali, 1984, hal: 268

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Please purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark.

menentukan terhadap perbuatan bagi seseorang. Pentingnya peran adalah dengan adanya peran yang diperoleh dari kedudukan akan bisa menentukan dan mengatur perilaku masyarakat atau orang lain.

Di samping itu, peran menyebabkan, seseorang pada batas-batas tertentu, dapat meramalkan perbuatan atau tindakan orang lain. Setiap individu yang bersangkutan akan dapat menyesuaikan perilaku sendiri dengan perilaku orang-orang yang ada dalam kelompoknya. Sebagai pola perlakuan, peran memiliki beberapa unsur, antara lain:

1. Peran ideal, sebagaimana dirumuskan atau diharapkan oleh masyarakat terhadap status-status tertentu. Peran tersebut merumuskan hak-hak dan kewajiban yang terkait dengan status tertentu.
2. Peranan yang dilaksanakan atau dikerjakan. Ini merupakan peranan yang sesungguhnya dilaksanakan oleh seseorang dalam kehidupan nyata. Peranana yang dilakukan dalam kehidupan nyata mungkin saja berbeda dengan peranan ideal, yang ideal hanya berada dalam fikiran dan belum terealisasi dalam kehidupan yang sebenarnya.

Masih terkait dengan peran, Suhardono menjelaskan bahwa peran dapat dijelaskan dengan beberapa cara yaitu: *pertama*, penjelasan historis: konsep peran pada awalnya dipinjam dari kalangan yang memiliki hubungan erat dengan drama dan teater yang hidup subur pada zaman Yunani Kuno atau Romawi. Dalam hal ini, peran berarti karakter yang disandang atau dibawakan oleh seorang aktor dalam sebuah pentas dengan lakon tertentu. *Kedua*, pengertian peran menurut ilmu sosial, peran dalam ilmu sosial berarti suatu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Please purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark.

fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktrur sosial tertentu. Dengan menduduki jabatan tertentu, seseorang dapat memainkan fungsinya karena posisi yang didudukinya tersebut.[37]

Kedudukan sendiri sering diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial. Dengan demikian, seseorang dikatakan mempunyai beberapa kedudukan karena biasanya dia ikut serta dalam berbagai pola kehidupan yang beragam. Pengertian tersebut menunjukkan tempatnya sehubungan dengan kerangka masyarakat secara menyeluruh. Masyarakat secara umum, biasanya mengembangkan dua macam kedudukan, yaitu:

1. *Ascribed status*, yaitu kedudukan seseorang dalam masyarakat tanpa memperhatikan perbedaan-perbedaan rohaniah dan kemampuan. Kedudukan tersebut diperoleh karena kelahiran. Misalnya, kedudukan anak kiai biasanya secara otomatis akan memperoleh penghormatan yang istimewa.
2. *Achieved status*, adalah kedudukan yang dicapai oleh seseorang dengan usaha-usaha yang disengaja. Kedudukan ini tidak diperoleh atas dasar kelahiran, akan tetapi diperoleh melalui usaha dan kerja keras. Oleh karena itu, kedudukan ini bersifat terbuka bagi siapa saja yang menginginkannya, bergantung pada kemampuan masing-masing dalam mengejar serta mencapai tujuan-tujuannya.[38]

---

[37] Ahmad Patoni, *Peran Kiai Pesantren dalam Partai Politik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007, hal: 40
[38] Ibid, hal: 41-44

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Please purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark.

Dengan penjelasan tersebut, dapat dikatakan bahwa peran adalah konsekuensi dari sebuah kedudukan. Dengan kata lain, aktivitas yang dijalankan oleh seseorang yang diakibatkan dari kedudukan itu, maka hal itu disebut sebagai peranan. Sementara itu, antara peran, kedudukan dan fungsi juga mempunyai kesamaan di samping juga memiliki perbedaan. Singkatnya, peran melibatkan aktivitas dan tindakan yang telah dilakukan dalam hal ini terjadinya sesuatu atau peristiwa. Sedangkan fungsi lebih pada aspek kegunaan atau bisa digunakan dalam pekerjaan yang sesuai dengan keududkan dimaksud.

b. Definisi Politik

Berbicara tentang politik, tentunya tidak lepas dari pendefinisian politik itu sendiri, karena dengan definisi itulah sebuah kata akan dimengerti secara konkret. Dalam sub ini, penulis akan mencoba untuk menjelaskan beberapa hal yang terkait dengan politik itu sendiri

Istilah politik berasal dari kata Polis (bahasa Yunani) yang artinya Negara Kota. Dari kata polis dihasilkan kata-kata, seperti: a) *Politeia* artinya segala hal ihwal mengenai Negara. b) *Polites* artinya warga Negara. c) *Politikus* artinya ahli Negara atau orang yang paham tentang Negara atau negarawan, dan d) *Politicia* artinya pemerintahan Negara.[39]

Tidak jauh berbeda, Sulistiyati menyebutkan bahwa secara etimologis, kata Politik berasal dari bahasa Yunani Polis yang berarti kota atau Negara

[39] Definisi itu penulis sadur dari kamus online yang terpercaya: http://id.wikipedia.org/wiki/Politik pada tanggal 30 November 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Please purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark.

kota.[40] Politik pertama kali dikenal melalui bukunya Plato yang berjudul "*Politeio* " yang juga dikenal dengan Republik. Politeio arti sebenarnya adalah konstitusi, yaitu suatu jalan atau cara untuk berhubungan antar sesama.[41] Sedangkan dalam agama Islam, politik disebut sebagai *Siyasah*, berasal yang berarti mengatur, memelihara dan selanjutnya diindonesiakan menjadi politik.[42]

Sedangkan secara istilah, banyak definisi yang dikemukakan oleh para tokoh. Menurut Miriam Budiarjo bahwa politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu system politik yang menentukan tujuan-tujuan dari system itu dan melaksanakan tujuan-tujuan tertentu. Joyce Mitchell seorang sarjana yang menekankan pengambilan keputusan sebagai inti dari politik, berpendapat bahwa politik adalah pengambilan keputusan kolektif atau pembuatan kebijaksanaan umum untuk masyarakat seluruhnya.[43]

Di samping itu, ada juga yang mendefinisikan politik sebagai seni, yaitu seni untuk mengatur kehidupan masyarakat dalam sebuah Negara. Dimana seorang pemegang kekuasaan menjadi aktor dalam politik itu.

Ada juga yang mendefinisikan politik sebagai kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat, sekaligus politik merupakan proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Sementara itu, politik juga diartikan sebagai kegiatan yang berkaitan dengan

---

[40] Sulistiyati Ismail, *Pengantar Ilmu Politik*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1989, hal: 11
[41] Ibid, hal: 13
[42] Ibid, hal: 14
[43] Jeje Abdul Rozak, *Politik Kenegaraan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001, hal: 40

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Please purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark.

cara bagaimana kelompok maupun individu merumuskan dan membuat putusan yang bersifat mengikat melalui usaha-usaha yang tersetruktur.

Dari beberapa definisi di muka dapat dikatakan bahwa politik tidak lepas dari beberapa hal di antaranya, pemegang kekuasaan, institusi, upaya kesejahteraan baik melalui keputusan maupun kebijakan-kebijakan lainnya, dan masyarakat.

1. Fungsi Politik

   Dalam suatu negara Politik sangat berguna sebagai pengatur kehidupan masyarakatnya, jika tidak ada Politik dalam suatu negara, maka kehidupan suatu negara akan menjadi berantakan, tidak ada tujuan, tidak ada undang-undang, tidak ada hukum dan tidak ada yang mengatur kehidupan negara, hal ini yang membuat politik sangat diperlukan dalam kehidupan bernegara.

   Oleh karena itu, sesuai dengan definisi-definisi politik sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, maka fungsi politik itu sendiri mencakup beberapa hal penting, di antaranya:

   a) Perumusan kepentingan, adalah fungsi menyusun dan mengungkapkan tuntutan politik suatu negara. Fungsi ini umumnya dijalankan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan semacamnya.

   b) Pemaduan kepentingan, adalah fungsi menyatupadukan tuntutan-tuntutan politik dari berbagai pihak dalam suatu negara (baca: masyarakat) dan mewujudkan sebuah kenyataan ke dalam berbagai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Please purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark.

alternatif kebijakan. Pelaku fungsi ini lebih menekankan partai politik.

c) Pembuatan kebijakan umum, adalah fungsi untuk mempertimbangkan berbagai alternatif kebijakan yang diusulkan oleh partai-partai politik dan pihak-pihak lain untuk dipilih, di antaranya sebagai satu kebijakan pemerintah. pelakunya adalah lembaga eksekutif bersama dengan legislatif.

d) Penerapan kebijakan, adalah fungsi melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pihak yang berwenang.

e) Pengawasan pelaksanaan kebijakan adalah fungsi mnyelaraskan perilaku masyarakat atau pejabat publik yang menentang atau menyeleweng dari kebijakan pemerintah dan norma-norma yang berlaku, atau fungsi mengadili pelanggar hukum. Pelakunya dalah lembaga hukum atau peradilan.[44]

Di samping fungsi tersebut, ada fungsi lain yang diajukan oleh tokoh politik yaitu:

a) Fungsi *Sosialisasi*, fungsi untuk mengembangkan dan memperkuat sikap-sikap politik di kalangan penduduk, atau melatih rakyat untuk menjalankan peranan-peranan politik, administrativ, dan yudisial tertentu. Di samping itu, sosialisasi dimaksud bisa berarti memasyarakatkan program-program yang dibuat pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

[44] Muhammad Azhar, *Filsafat Politik*, Jakarta: Raja Grafindo, 1997, hal: 68

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Please purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark.

b) Fungsi *Rekruitmen*, yaitu fungsi penyeleksian masyarakat untuk kegiatan politik dan jabatan pemerintahan melalui penampilan dalam media komunikasi, menjadi anggota organisasi, mencalonkan diri untuk jabatan tertentu, dan lainnya.

c) Fungsi *komunikasi*, dalam artian bahwa politik merupakan jalan mengalirnya informasi melalui masyarakat dan melalui berbagai struktur yang ada dalam sistem politik

c. Kiai: Sebuah Definisi

Menurut KH. Abdurrahman Wahid dalam buku *Memelihara Umat, Kiai Pesantren – Kiai Langgar di Jawa* istilah *kiai, bindere, nun, ajengan dan guru* adalah sebutan yang semula diperuntukkan bagi ulama tradisional di pulau Jawa, walaupun sekarang ini kiai digunakan secara generik bagi semua ulama, baik tradisional maupun modernis, di pulau Jawa maupun di luar Jawa.

Istilah ustadz, yang dulunya menjadi tanda pengenal ulama modernis atau ulama kalangan masyarakat Arab di negeri kita, sekarang juga sudah masuk dalam lingkungan pondok-pondok pesantren. Memandang dunia keulamaan dari sudut pandangan terminologi yang digunakan seperti itu, itu saja sudah mengharuskan kita untuk melakukan pembagian para kiai berdasarkan macam-macam tolok ukur.[45]

Bagi pemahaman Jawa, Kiai atau Kiai adalah *sebutan untuk "yang dituakan ataupun dihormati" baik berupa orang, ataupun barang*. Selain Kiai,

[45] Pradjarta Dirjosanjoto, *Memelihara Umat, Kiai Pesantren – Kiai Langgar di Jawa*, Jogjakarta: LKiS, 1991, hal: xiii

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Please purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark.

bisa juga digunakan sebutan Nyai untuk yang perempuan. Kiai bisa digunakan untuk menyebut beberapa hal di antaranya:

a). Ulama atau Tokoh, contoh: Kiai Haji Hasyim Muzadi.

b). Pusaka, contoh: Keris Kiai Joko Piturun, Gamelan Kiai Gunturmadu.

c). Hewan, contoh: Kerbau Kiai Slamet, Kuda Kiai Gagak Rimang.

d). Makhluk Halus, contoh: Kiai Sapujagad (Penunggu Merapi).

e). Orang yang sudah meninggal (meskipun berusia muda). Bisa dilihat di nisan pada kompleks makam masyarakat Jawa.[46]

Dalam *Shorter Encyclopedia of Islam* yang ditulis oleh H. A. R. Gibb dan J. H. Kramers, kiai itu sebagai ahli agama sering juga disebut sebagai "ulama", sebutan yang lebih umum dipakai di lingkungan masyarakat Islam. Ulama sendiri adalah bentuk plural (jamak) dari kata *'alimun* yang berarti orang yang mengetahui. Kata itu sangat lurmrah digunakan di negara Timur Tengah, seperti Arab Saudi dan yang lainnya.[47]

Menurut K. Mustafa Bisri, istilah kiai adalah produk budaya karena istilah kiai pada awal lahirnya tidak ditemui dalam istilah bangsa dan negara Indonesia kecuali di Jawa. Lebih lanjut dia mengatakan bahwa kiai dalam istilah jawa seperti halnya sebutan ajengan untuk orang Sunda, tengku untuk orang Aceh, syekh untuk orang Sumatra Utara, buya untuk orang

[46] Di ambil dari website Gerakan Pemuda Ansor, gpansor.org diunduh pada tanggal 22 November 2011.
[47] H.A.R Gibb dan JH Kramers, *Shorter Encydopaedia of Islam*, Cornell University Press, Ithaca, New York, 1953, hal: 559

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Please purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark.

Minangkabau, dan tuan guru untuk orang Nusa Tenggara Timur dan Kalimantan.[48]

Kiai juga disebut sebagai "elit agama". Istilah elit berasal dari bahasa Inggris "*elite*" yang juga berasal dari bahasa Latin "*eligere*", yang berarti memilih. Istilah elit digunakan pada abad ke tujuh belas, untuk menyebut barang-barang dagangan yang mempunyai keutamaan khusus, yang kemudian digunakan juga untuk menyebut kelompok-kelompok sosial tinggi seperti kesatuan-kesatuan militer atau kalangan bangsawan atas.[49]

Secara sederhana dalam fokus penelitian ini, kiai yang dimaksud adalah sosok yang memiliki kecakapan dan pemahaman yang mendalam tentang ilmu agama dan menjadi panutan masyarakatnya.

1. Syarat Non-Formal Disebut Kiai

Terkait dengan syarat seseorang bisa disebut kiai, Patoni hanya menyebutnya sebagai syarat non-formal, karena menurutnya istilah kiai merupakan produk budaya sehingga bisa saja antar satu tempat berbeda dengan tempat yang lainnya. Menurut Ahmad Patoni, syarat non formal yang harus dipenuhi seseorang untuk bisa disebut kiai yaitu *pertama*, keturunan ulama, *kedua*, memiliki pengetahuan agama yang luas, *ketiga*, memiliki santri atau murid, dan *keempat*, penuh dengan pengabdian kepada masyarakat.[50]

---

[48] Disadur dari ceramah KH. Mustafa Bisri yang ditayangkan di TV9 Sembilan pada tanggal 23 November 2011, jam 15.30.

[49] Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: Gramedia, 1994, hal: 24

[50] Ahmad Patoni, *Peran Kiai Pesantren dalam Partai Politik*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2007, hal: 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Please purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark.

Sedangkan Horikoshi menyebutkan bahwa kiai dapat dilihat dari tiga aspek: 1) sebagai pemangku masjid dan sekolah sebagai. 2) sebagai pengajar dan pendidik baik secara formal maupun non-formal. 3) sebagai ahli dalam bidang hukum islam dan menjadi panutan masyarakat dalam berhukum.[51] Syarat ini bisa saja berbeda antara satu daerah dengan daerah lain mengingat peristilahan kiai juga berbeda antara daerah.

2. Politik Kiai

a. Politik Kiai dalam Lintasan Sejarah

Zamakhsyari Dhofier mencatat bahwa keterlibatan kiai dalam politik dimulai sejarah Islam masuk pulau Jawa. Pada saat itu penguasa harus berkompetisi dengan pembawa panji-panji Islam, yaitu para ulama dalam perebutan kekuasaan yang sangat rumit. Sebab para kiai yang sepanjang hidupnya memimpin aktivitas kehidupan keagamaan juga memperoleh pengaruh politik.

Pada masa akhir kekuasaan kerajaan Majapahit dan awal kemunculan kerajaan Islam Demak, memperlihatkan adanya peralihan legitimasi kekuasaan yang semula di tangan raja beralih ke tangan para ulama yang dikenal dengan sebutan Walisongo. Sedangkan pada masa penjajahan Belanda, peran kiai dalam bidang politik ditandai dengan munculnya pemberontakan-pemberontakan yang dipimpin oleh para ulama seperti Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, Tengku Umar, Tengku Cikditiro, KH

[51] Ibid, hal: 25

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Please purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark.

Zainal Mustofa dan lain-lain. Begitu pula pada masa kebangkitan nasional, kiai ikut ambil peran dalam bidang politik yang dimotori oleh KH Umar Said Cokroaminoto, KH Samanhudi, KH Hasyim Asy'Ari dan KH Ahmad Dahlan. Kemudian berlanjut pada masa persiapan kemerdekaan RI dengan tampilnya KH Wahid Hasyim dari NU, KH Mas Mansur dari Muhamadiyah dan KH Agus Salim dari sareket Islam.[52]

Di era berikutnya, yaitu pada tahun 1945-1959, setelah proklamasi kemerdekaan, para ulama juga berperan aktif dalam politik berkenaan dengan maklumat No.X tertanggal 5 November 1945 tentang dibenarkannya pembentukan partai-partai politik sebagai sarana pelaksanaan demokrasi didalam negara Republik Indonesia, maka pada tanggal 7-8 November 1945, diadakan kongres umat Islam Indonesia di Yogyakarta yang dihadiri oleh para ulama, tokoh-tokoh politik, organisasi-organisasi sosial.

Pada masa orde baru (Orba), peran kiai sebagai pengontrol pemerintah, sepertin seperti KH Dalari Umar, KH Abdullah Syafe'i, KH Noer Ali berhasil mengerahkan masa pemuda Islam untuk melakukan demonstrasi ke DPR yang sedang membahas rancangan undang-undang perkawinan yang sebagian pasalnya bertentangan dengan hukum perkawinan Islam.[53] Sedangkan pada masa reformasi, keterlibatan kiai dalam politik semakin erat bahkan masuk sepenuhnya. Hal itu dibuktikan dengan adanya kiai yang turut andil mencalonkan diri sebagai presiden maupun calon presiden, seperti KH.

---

[52] Posmo, *Peran Kiai*, edisi 268, terbit pada tanggal 2 Juni 2004, hal: 10
[53] Abdul Qadir Jailani, *Peran Ulama dan Santri*, Surabaya: Bina Ilmu, 1994, hal: 135

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Please purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark.

Abdurrahman Wahid, KH. Hasyim Muzadi, KH. Sholahudin Wahid dan lainnya.[54]

Di masa yang akan datang, diprediksikan bahwa kiai akan bisa menjadi aktor politik, dalam artian mayoritas yang memimpin. Hal itu menjadi benar ketika melihat bahwa perselingkuhan kiai dengan politik dewasa ini semakin dekat. Banyaknya kiai yang menjadi anggota partai dan kemudian menduduki peranan-peranan penting di daerah juga akan menjadi sebab dominan perpolitikan kiai ke depan.

Dorongan masyarakat untuk politik kiai juga menjadi salah satu penguat eksistensi kiai dalam politik. Karena bagaimanapun, politik kiai dalam pandangan masyarakat akan lebih baik disbanding dengan politik non kiai. Di samping mereka memiliki keilmuan yang cukup, juga dipandang sebagai sosok yang dekat dengan Tuhan. Oleh karenanya, menurut mereka, paling tidak politik kiai akan menciterakan politik yang lebih agamis.

b. Prinsip Politik Kiai

Prinsip politik kiai pada hakikatnya tidak terlepas dari prinsip politik islam. Hal itu dikarenakan bahwa kiai hakikatnya adalah taokoh agama yang selalu menjunjung tinggi moral agama. Dengan begitu, prinsip politik kiai yaitu:

1) Musyawarah.

Musyawarah adalah asas yang paling utama berkenaan dengan pemilihan ketua Negara dan orang-orang yang akan menjabat tugas utama

[54] Majalah Aula, *Peran Politik Kiai*, ditulis oleh Afifullah Hasan, November 2008.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Please purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark.

dalam mengawal perbaikan kehidupan masyarakat. Bukan hanya itu, musyawarah juga digunakan sebagai media untuk mencari solusi dan memecahkan masalah keumatan menuju kehidupan dan pemerintahan yang lebih baik sesuai dengan yang diajarkan al-Quran dan al-Hadis.

2) Keadilan

Keadilan di sini berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya dan sesuai dengan porsi masing-masing. Keadilan mencakup semua aspek kehidupan, baik ekonomi, sosial, budaya, politik dan lainnya.

3) Persamaan

Prinsip persamaan bagi politik kiai menjadi sangat penting ketika melihat fakta bahwa tidak semua kiai yang terlibat dalam politik memiliki misi yang sama dan bisa saja berbeda. Oleh karenanya, dengan prinsip ini orientasi yang berbeda tersebut dapat disikapi sehingga tidak terjadi bentrok kepentingan antar sesama. Di samping itu, asas ini berarti bahwa kiai harus melihat secara sama semua masyarakat tanpa membedakan ras, budaya, suku, dan agamanya.

c. Etika Politik Kiai

Dalam istilah agama, etika sering disebut dengan akhlak yang memiliki makna tata cara atau perilaku seseorang dalam kehidupan sehari-hari yang dinilai dari sudut pandang baik-buruknya dan kesesuaiannya dengan ajaran agama.[55]

[55] Fran Magnis Suseno, *Etika Politik*, hal: 73

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Please purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa etika politik adalah seperangkat aturan atau norma dalam bernegara di mana setiap individu dituntut untuk berperilaku sesuai dengan ketentuan Allah dan rasul-Nya sebagaimana yang tercantum dalam al-Quran dan al-Hadis.

Dengan begitu, kiai sebagai pemangku agama ketika terlibat dalam politik selayaknya tetap berpegang teguh pada ajaran agama itu. Etika politiknya harus tetap berdasar pada ketentuan yang ada. Hal ini harus dipertegas karena dewasa ini *iamge* kiai mulai tercoreng utamanya pasca menjamurnya kiai yang terlibat dalam tindak pidana korupsi, kiai yang menyalahgunakan wewenag politiknya, kiai yang memperkaya diri, atau bahkan ada kiai yang menggunakan jabatan politiknya untuk memperbanyak istri. Perilaku demikian jelas telah melanggar etika politik kiai yang hakiki.[56]

d. Orientasi politik kiai

Pada hakikatnya, orientasi politik kiai adalah *amar ma'ruf nahi mungkar*. Konsep *amar ma'ruf nahi mungkar* itu diletakkan dalam pengertian yang seluas-luasnya, yaitu mengawasi dan mengevaluasi.[57] Selain memimpin pondok pesantren, mereka juga aktif dalam berbagai kegiatan social keagamaan dan berbagai kegiatan lainnya. Tugas dan peran kiai sebagai pengasuh pondok pesantren dan politik menyebabkan kiai melakukan peran ganda.

Keterlibatan kiai dalam politik, tidak bisa dilihat hanya sebagai sikap sesaat. Pilihan sikap tersebut memiliki keterkaitan dengan dinamika sosial

[56] Di ambil dari tirmidiz85.blogspot.com dengan judul tulisan '*Kiai dan Korupsi: Mempertegas Etika Politik Kiai*', di akses pada tanggal 14 November 2011.
[57] Hiroko Horikoshi, *Kiai dan Perubahan Sosial*…160

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Please purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark.

politik yang sedang berkembang, dan juga berkaitan dengan seluk beluk politik pada masa sebelumnya.[58] Pada era orde baru, kecenderungan arus politik yang sentralistik menjadikan kiai menghadapi dilemma, khususnya saat berhadapan dengan pemerintah.[59]

Segala aktivitas politik masyarakat, termasuk aktivitas politik yang dilakukan kiai, dibatasi atau bahkan dicurigai. Untuk memudahkan kontrol terhadap aktivitas kalangan kiai, pemerintah membentuk majelis ulama Indonesia (MUI) sebagai wadah koordinasi gerakan ulama.[60]

Era reformasi membawa perubahan konstelasi politik secara mendasar. Bergulirnya anger reformasi yang kemudian diikuti dengan terbentuknya beberapa partai islam tampaknya memberi angina segar bagi para ulama di negeri ini. Pelaksanaan pemilu dengan multipartai telah membuka peluang bagi partisipasi dari berbagai elemen masyarakat secara luas, termasuk kalangan kiai. Kiai menjadi sosok yang memiliki posisi tawar strategis dalam politik yang berlangsung saat itu.

Di samping itu, ada juga yang mengatakan bahwa tujuan atau orientasi politik ulama pada hakikatnya adalah dakwah atau penyebaran ajaran atau nilai-nilai agama. Sehingga politik tidak hanya berorientasi pada kekuasaan belaka tapi juga bernilai agamis. Ini sekaligus sebagai bukti bahwa agama adalah rahmat bagi semua alam, yang disebut oleh Quraish Shihab sebagai agama universal.

---

[58] Ahmad Patoni, *Peran Kiai Pesantren*…..158
[59] Ibid. hal: 159
[60] Ibid, hal: 172

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Please purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark.

3. Peran Politik Kiai

Tidak bisa dinafikan bahwa kiai juga memiliki hak untuk berpartisipasi dalam politik. Era reformasi yang telah membuka kembali kebebasan masyarakat untuk turut serta dalam berbagai bidang adalah bentuk nyata terbukanya 'gerbang' politik bagi kiai. Hal itu didasarkan juga pada peran politik kiai yang sejak dahulu memiliki pengaruh yang cukup besar.

Qadir menjelaskan bahwa secara umum setidaknya ada dua peran yang dilakukan oleh kiai dalam konstelasi politik. *Pertama*, peran formal. Dalam hal ini, kiai adalah sosok politisi yang telah masuk pada sistem politik. Dengan begitu, kiai dalam hal ini juga turut serta dalam melaksanakan rencana dan kegiatan partai, misalnya menjadi dewan perwakilan rakyat, kampanye, rapat kerja dan semacamnya. *Kedua*, peran *nonformal*, dalam hal ini kiai lebih berstatus sebagai kiai namun kemudian juga mereka mencoba mendekati politik itu sendiri. Kiai semacam ini, secara struktural tidak bisa dikatakan sebagai politisi namun secara sosial mereka memiliki peran serta dalam lingkaran politik yang berkembang. Kiai semacam ini yang kemudian sering kali dijadikan kambing hitam oleh para politisi untuk kepentingan politik mereka.[61]

4. Agama dan Politik kiai

Pada beberapa tahun terakhir, pembicaraan antara agama dan politik tidak pernah menemukan titik penyelesaian. Antara keduanya menimbulkan kubu-kubu yang terorganisir dalam kehidupan masyarakat. Di satu sisi, ada

[61] Abdul Qadir, *Peran Ulama dan Santri…hal:* 127

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Please purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark.

pihak yang menyepakati adanya relasi agama dengan politik, tapi di sisi yang berbeda ada pula orang yang menolaknya, karena agama adalah agama dan politik adalah politik itu sendiri.[62]

Dalam konteks kehidupan sosial kemasyarakatan, khususnya dalam pandangan kiai politis, hubungan antara agama dan politik jelas memiliki suatu keterkaitan, namun tetap harus dibedakan. Satu pihak, masyarakat agama memiliki kepentingan mendasar agar agama tidak dikotori oleh kepentingan politik, karena bila agama berada dalam dominasi politik, maka agama akan sangat mudah diselewengkan. Akibatnya, agama tidak lagi menjadi kekuatan pembebas atas berbagai bentuk penindasan dan ketidakadilan, sebaliknya agama akan berkembang menjadi kekuatan yang menindas dan kejam.

Di pihak lain, adalah kewajiban moral agama untuk ikut mengarahkan politik agar tidak berkembang menurut seleranya sendiri yang bisa membahayakan kehidupan. Agar agama dapat menjalankan peran moral tersebut, maka agama harus dapat mengatasi politik, bukan terlibat langsung ke dalam politik praktis. Karena bila agama berada di dalam kooptasi politik, maka agama akan kehilangan kekuatan moralnya yang mampu mengarahkan politik agar tidak berkembang menjadi kekuatan yang menekan kehidupan dan menyimpang dari batas-batas moral dan etika agama, masyarakat, dan hukum.[63]

---

[62] Lihat dakwatuna.com dalam tulisan M. Natsir, diunduh pada tanggal 22 Februari 2012.
[63] Rolan Syafiie, *Agama dan Politik*, Bandung: Pustaka Politika, 2003, hal: 88

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Please purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark.

Dalam konteks keterkaitan ilmiah, maka hubungan antara agama dan politik harus diwaspadai sehingga ia tidak sampai berjalan pada posisi yang salah. Salah satu ukuran atau kunci yang paling mudah dikenali agar kita dapat menarik batas yang mana politik yang harus dihindari sehingga kita tidak terjebak ke dalam arus politik kotor, khususnya oleh kaum Buddhis adalah dengan menghindari penggunaan kekerasan. Artinya politik yang harus dihindari adalah politik yang menyangkut perebutan kekuasaan melalui penggunaan kekerasan, termasuk dengan memperalat orang lain atau suatu organisasi, apalagi bila sudah menggunakan simbol-simbol agama yang bisa sangat menyesatkan.

Terkait dengan hal itu, Bolland kemudian menyimpulkan bahwa ada tiga paradigma lama mengenai hubungan agama dengan politik. *Pertama*, agama dan politik adalah dua hal yang berbeda wilayah. Agama merupakan wilayah pribadi yang bersifat illahiyah, sedangkan politik adalah masalah yang bersifat duniawiyah. *Kedua*, agama dan politik tidak bisa dipisahkan, sebab agama meliputi segala aspek kehidupan manusia, termasuk kehidupan politik. *Ketiga*, agama dan politik bukan dua hal yang perlu dipertentangkan, sebab agama adalah seperangkat nilai-nilai yang bisa menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi kehidupan manusia dalam segala aspek.

Terkait dengan hal itu, kiai politik lebih cenderung pada pandangan yang ketiga yakni tidak mempertentangkan antara agama dengan politik, bahkan menyelaraskannya. KH. Busyro Karim salah satu kiai dan sekaligus politis dari partai kebangkitan bangsa pernah menyatakan bahwa sudah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Please purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark.

saatnya para kiai mengompromikan antara agama dan politik karena keduanya tidak bias dipisahkan *toh* walaupun keduanya adalah hal yang berbeda. Menurutnya, setidaknya ada dual hal yang perlu diperhatikan kaitannya dengan relasi agama dan politik yaitu:

Pertama, bagaimana agama dapat membentengi diri mereka dari setiap kecenderungan/kekuatan politik yang berkembang di sekitar mereka, sehingga agama dapat tetap menjadi kekuatan pembebas dan bukan sebaliknya menjadi yang dibebaskan atau pencipta masalah karena telah terdistorsi oleh kekuatan-kekuatan politik tersebut. *Kedua,* bagaimana agama dapat memainkan peran moral mereka untuk ikut mengarahkan politik agar tidak berkembang menjadi kekuatan yang menyimpang dan menekan kehidupan. [64]

Kaitannya dengan KH. Mahfudz Yasir, politik bagi beliau adalah urusan dunia tapi juga dapat dijadikan sebagai jalur menuju akhirat. Hal itu dapat terjadi ketika politik didasarkan pada landasan moral yaitu agama. Agama dalam hal ini berarti tempat sandaran yang dijadikan tolak ukur dalam mengamalkan politik kiai. Sehingga semua program, rencana, dan lakon politik lainnya, harus disesuaikan dengan nilai-nilai agama.

Alasan mendasarnya adalah bahwa agama adalah aturan bagi seluruh umat manusia dan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk di dalamnya politik. Ketika ada kesalahan dan ketidaksesuaian antara politik dengan agama atau sebaliknya, maka akan terjadi ketidak seimbangan sistem yang terjadi di masyarakat.

---

[64] Lihat www.sumenep.go.id dalam tulisan Junaidi *Relasi Agama dan Politik Kiai.* Diunduh pada tanggal 21 Feburuari, 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Please purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark.

B. Kerangka Teoritik

Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif ini, penulis menggunakkan teknik analisis deskriptif. Setelah data terkumpul baik dari data primer maupun sekunder, penulis menganalisis dalam bentuk deskripsi. Analisis deskripsi merupakan analisis yang dilakukan dengan memberikan gambaran (deskripsi) dari data yang diperoleh di lapangan. Dari data yang diperoleh di lapangan, langkah selanjutnya yaitu dianalisis dengan menggunakan teori yang sudah ditentukan.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori struktural fungsional. Teori fungsionalisme struktural adalah suatu bangunan teori yang paling besar pengaruhnya dalam ilmu sosial di abad sekarang. Tokoh-tokoh yang pertama kali mencetuskan fungsional yaitu August Comte, Emile Durkheim dan Herbet Spencer.

Pemikiran *structural fungsional* sangat dipengaruhi oleh pemikiran biologis yaitu menganggap masyarakat sebagai organisme biologis yaitu terdiri dari organ-organ yang saling ketergantungan, ketergantungan tersebut merupakan hasil atau konsekuensi agar organisme tersebut tetap dapat bertahan hidup. Sama halnya dengan pendekatan lainnya pendekatan struktural fungsional ini juga bertujuan untuk mencapai keteraturan sosial. Teori struktural fungsional ini awalnya berangkat dari pemikiran Emile Durkheim, dimana pemikiran Durkheim ini dipengaruhi oleh Auguste Comte dan Herbert Spencer. Comte dengan pemikirannya mengenai analogi organismik kemudian dikembangkan lagi oleh Herbert Spencer dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Please purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark.

membandingkan dan mencari kesamaan antara masyarakat dengan organisme, hingga akhirnya berkembang menjadi apa yang disebut dengan *requisite functionalism*, dimana ini menjadi panduan bagi analisis substantif Spencer dan penggerak analisis fungsional.

Dipengaruhi oleh kedua orang tersebut, studi Durkheim tertanam kuat terminologi organisme tersebut. Durkheim mengungkapkan bahwa masyarakat adalah sebuah kesatuan dimana di dalamnya terdapat bagian–bagian yang dibedakan. Bagian-bagian dari sistem tersebut mempunyai fungsi masing–masing yang membuat sistem menjadi seimbang. Bagian tersebut saling interdependensi satu sama lain dan fungsional, sehingga jika ada yang tidak berfungsi maka akan merusak keseimbangan sistem.

Pemikiran inilah yang menjadi sumbangsih Durkheim dalam teori Parsons dan Merton mengenai struktural fungsional. Selain itu, antropologis fungsional-Malinowski dan Radcliffe Brown juga membantu membentuk berbagai perspektif fungsional modern.[65]

Teori struktural fungsional mengedepankan suatu perspektif yang menekankan harmonisasi dan regulasi yang dikembangkan berdasarkan sejumlah asumsi-asumsi yang dapat dikembangkan lebih jauh sebagai berikut:

1. Masyarakat harus dilihat sebagai suatu sistem yang kompleks, terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan dan saling tergantung, dan setiap bagian tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap bagian-bagian lainnya.

[65] Wikipedia.com/teori-struktural-fungsional. Diunduh pada tanggal 19 Februari 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Please purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark.

2. Setiap bagian dari sebuah masyarakat eksis karena bagian tersebut memiliki fungsi penting dalam memelihara eksistensi dan stabilitas masyarakat secara keseluruhan; karena itu, eksistensi satu bagian tertentu dari masyarakat dapat diterangkan apabila fungsinya bagi masyarakat sebagai keseluruhan dapat diidentifikasikan.
3. Semua masyarakat mempunyai mekanisme untuk mengintegrasikan diri; sekalipun integrasi sosial tidak pernah tercapai secara sempurna, namun sistem sosial akan senantiasa berproses ke arah itu.
4. Perubahan dalam sistem sosial umumnya terjadi secara gradual, melalui proses penyesuaian, dan tidak terjadi secara cepat dan otomatis.
5. Faktor terpenting yang mengintegrasikan masyarakat adalah adanya kesepakatan di antara para anggotanya terhadap nilai-nilai kemasyarakatan tertentu.
6. Masyarakat cenderung mengarah pada suatu keadaan seimbang.[66]

Menurut penganut teori struktural fungsional, kontrol terhadap efektifitas hukum keteraturan serta faktor-faktor yang mempersatukan masyarakat perlu dipahami, dikembangkan, dan ditindaklanjuti untuk menciptakan keteraturan tatanan masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukan dorongan terhadap perkembangan sosiologi regulasi dalam semua tahap, dengan mengarahkan pada upaya menjelaskan peristiwa-peristiwa sosial secara rasional dan empiris.

[66] Ritzer Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta: Kencana, 2006, hal: 35-36

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Please purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark.

Teori ini bercorak pragmatis dalam orientasinya, sehingga pendekatan yang dipilih lebih mengarah pada upaya pemecahan masalah yang dalam mengoperasikannya, para eksponen teori struktural fungsional lebih mengedepankan komitmen mereka yang kuat terhadap prinsip-prinsip rekayasa sosial, dan rekayasa tersebut dimulai dari sekelompok elit. Hasil rekayasa elit itu kemudian disebarkan kepada masyarakat luas melalui proses difusi secara bertahap.

Fokus dari teori ini adalah dalam upaya menjelaskan status quo, tertib sosial, konsensus, integrasi sosial, solidaritas, dan aktualitas. Tokoh-tokohnya adalah Auguste Comte, Herbert Spencer, Charles Darwin, Robert K. Merton, Talcott Parsons, Durkheim dan lain-lain.[67]

Di samping teori tersebut, penulis juga akan menopangnya dengan teori lain yaitu teori aksi. Secara spesifik, Parsons dalam Charles menyusun skema unit-unit dasar tindakan sosial dengan karakteristik sebagai berikut:

a) Adanya individu sebagai aktor
b) Aktor dipandang memiliki tujuan-tujuan tertentu
c) Aktor mempnyai alternatif cara, alat serta teknik untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu
d) Aktor berhadapan dengan sejumlah kondisi situasional yang dapat membatasi tindakannya dalam mencapai tujuan. Kendala tersebut berupa situasi dan kondisi, sebagaian ada yang tidak dapat dikendalikan oleh individu.

[67] Usman Sunyoto, *Sosiologi: Sejarah, Teori dan Metodologi*, Yogyakarta: Cired, 2004, hal: 84

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Please purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark.

e) Aktor berada di bawah kendala dari nilai-nilai, norma-norma dan berbagai ide abstrak yang mempengaruhinya dalam memilih dan menentukan tujuan serta tindakan alternatif untuk mencapai tujuan.[68] Oleh karenanya, aktor harus juga memerhatikan nilai-nilai atau norma-norma yang ada di lingkungannya, sehingga apa yang dilakukan tidak menimbulkan terjadinya ketimpangan akan tetapi menjadikan terjadinya keseimbangan antara satu elemen dengan elemen yang lainnya.

C. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam sub ini penulis akan memaparkan beberapa hasil penelitian yang terkait dengan penelitian ini:

1. *Pandangan Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga terhadap Peran Politik Kiai*, skripsi yang ditulis oleh Syairullah dari fakultas Dakwah/Sosiologi. Dalam kesimpulannya dia menjelaskan bahwa kiai mempunyai peran signifikan dalam transformasi sosial dan budaya. Peran politik kiai sebagai penegak keimanan dengan cara mengajarkan doktrin-doktrin keagamaan dan memelihara amalan keagamaan di kalangan umat islam.
2. *Peran Politik Kiai di Pedesaan (studi Kasus di Kecamatan Wangun Banyumas)*, skripsi yang ditulis oleh Tri Sundari dari fakultas ilmu sosial Universitas Negeri Semarang pada tahun 2005. Dalam

[68] Charles, *Sosiologi Komunikasi Massa*, Bandung: Remaja Karya, 1998, hal: 211

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Please purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark.

kesimpulannya dia menyebutkan bahwa kiai di desa Wangun memiliki multifungsi yaitu sebagai kiai atau tokoh masyarakat, sekaligus sebagai politisi dimana dalam keduanya sama-sama memiliki peran yang signifikan. Posisi strategis kiai dalam politik mendorong adanya hubungan mereka dengan pemerintah dan tokoh-tokoh politik sehingga terjadilah interaksi dan menjadi media bagi mereka untuk ikut berpartisipasi dalam perbaikan bangsa dan negara sekaligus menyebarkan nilai-nilai agama yang pada hakikatnya menjadi fak mereka. Secara khusus peran politik kiai sangat mempengaruhi politik masyarakat dalam pemilu walaupun tidak semua masyarakat mengikutinya.

3. *Peran Politik Kiai dalam Pilpres 2009 di Pamekasan Madura,* skripsi ini ditulis oleh Nian Nurul Ifan pada tahun 2010 di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Dia berkesimpulan bahwa peran politik kiai diharapkan membawa implikasi terhadap situasi politik yang lebih baik karena mereka memiliki peran yang sangat strategis. Di samping itu, ada banyak langkah-langkah politis strategis yang dapat ditempuh oleh kiai untuk membangun kehidupan bangsa dan negara yang lebih baik.
4. *Agama dan Politik (Studi tentang Pandangan KH. Mustafa Ja'far terhadap Politisasi Agama di Desa Aengdakeh Sumenep Madura),* skripsi yang ditulis oleh saudara Moh. Irfan di UIN Jakarta pada tahun 2001. Dalam kesimpulan akhirnya dia menyimpulkan bahwa politisasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Please purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark.

agama menurut KH. Mustafa Ja'far lebih menguntungkan politik dari pada agama itu sendiri. Agama ketika dipolitisasi lebih cenderung 'mengalah' dan tidak bisa bergerak. Dalam kesimpulan yang kedua bahwa kiai selayaknya dapat dan mampu mengompromikan antara agama dan politik, dan mengedepankan agama dibanding politik. Sehingga ketika ada pertentangan antara keduanya, maka yang diperioritaskan adalah agama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Please purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark.

BAB III

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Setting Penelitian

Dalam poin ini, penulis akan menyajikan beberapa data yang merupakan hasil penelitian di lapangan, baik terkait dengan letak georafis, gambaran sosio-kultural, gambaran religius, tingkat pendidikan penduduk, dan lainnya. Dan yang lebih urgen yaitu tentang sosok KH. Mahfudz Yasir, aktivitas dakwahnya, metode dan media yang digunakan dalam dakwah beliau, dan hal-hal lain yang terkait dengan aktivitas dakwahnya dalam politik di Desa Sarirogo-Sukodono-Sidoarjo.

Berikut penulis paparkan secara rinci dan deskriptif hasil penelitian yang telah didapatkan di lapangan, baik itu melalui observasi, interview, maupun dokumentasi.

1. Gambaran Umum Desa Sarirogo

Kata Sarirogo berasal dari bahasa Indonesia yaitu 'sari' yang berarti inti dan 'raga' yang berarti jasad. Kedua kata tersebut kemudian digabungkan menjadi satu kata majemuk 'sariraga'. Kemudian, kata ini disadur ke dalam bahasa Jawa yang terbiasa menggunakan huruf O di setiap akhir kata, sehingga menjadi 'Sarirogo'. Menurut laporan Mbah Sutadi[69], konon penamaan Sarirogo sendiri dimaksudkan agar masyarakat tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bekerja, berinteraksi, maupun beribadah pada Tuhannya. Akan tetapi

[69] Adalah sesepuh desa Sarirogo sekarang tinggal di Luwung Sarirogo Sidoarjo, wawancara pada tanggal 12 September 2011 jam: 13.00 Wib.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Please purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark.

bagaimana mereka bisa mencurahkan rohaniah yang merupakan inti dari jasad mereka (Sarirogo). Kekuatan jasad hanyalah kekuatan yang tampak sedangkan kekuatan rohani adalah kekuatan yang tersembunyi, dan yang tersembunyi itulah yang lebih berpengaruh dalam kehidupan manusia.[70]

Versi lain menyebutkan bahwa penamaan Desa Sarirogo diberikan oleh sesepuh yang tidak diketahui namanya. Hal itu dimaksudkan agar di kemudian hari Desa ini dapat menjadi roh atau inti dari Sidoarjo, utamanya dalam bidang keagamaan. Karena menurut sesepuh tersebut kota Sidoarjo diprediksi akan segera tiba waktunya untuk menjadi kota 'metropolitan'. Dan prediksi tersebut seakan sudah mulai tampak dewasa ini.[71]

a. Letak Geografis

Secara georafis, Desa Sarirogo termasuk Desa yang cukup luas yang mencapai sekitar 142.04 hektar dengan curah hujan 2000 mm per tahun dan tinggi tempat dari permukaan laut berkisar empat meter. Desa ini terdiri dari 5 RW dan 22 RT.[72] Berikut dispesifikasikan dalam tabel:

Tabel IV: Batas-batas Desa Sarirogo

Batas	Desa/Kelurahan	Kecamatan
Sebelah utara	Kebonagung	Sukodono
Sebelah selatan	Cemeng Bakalan	Sidoarjo
Sebelah Barat	Urang Agung	Sidoarjo
Sebelah Timur	Anggaswangi	Sukodono

[70] Hasil wawancara dengan mbah Sutadi pada tanggal 12 November 2011, jam: 15.52 WIB
[71] Hasil wawancara dengan Bapak Mustafa (penduduk desa) pada tanggal 12 November 2011, jam: 16.00 WIB.
[72] Diperoleh dari hasil monografi Desa dan Dokumentasi profil Desa Sarirogo, Sidoarjo.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Please purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark.

Tabel V: Dengan orbitasi sebagai berikut:

1	Jarak ke ibu kota kecamatan terdekat	6 km
2	Lama tempuh ke ibu kota kecamatan terdekat	0.25 jam
3	Jarak ke ibu kota kabupaten / kota terdekat	15 km
4	Lama tempuh ke ibu kota / kota terdekat	0.45 jam

Adapun letak kediaman KH. Mahfudz Yasir (yang menjadi objek dalam penelitian ini) yaitu di pondok pesantren Salafiyah Metal RT. 05 RW 01 Desa Sarirogo nomor 07 kabupaten Sidoarjo. Dengan begitu, perizinan terkait dengan penelitian ini yaitu mulai dari Bakesbang, Kepala Desa, dan dari KH. Mahfudz Yasir sendiri. Jelasnya, penelitian ini berlangsung di Desa Sarirogo sedangkan yang menjadi objek penelitiannya adalah Dakwah KH. Mahfudz Yasir di Desa tersebut.

b. Gambaran Sosial Desa Sarirogo

Dalam item ini, penulis akan memaparkan gambaran sosial kemasyarakatan Desa Sarirogo dimana KH. Mahfudz Yasir berdiam. Lebih spesifiknya, berikut disajikan tentang kondisi perekonomian, mata pencaharian, jumlah penduduk, tingkat pendidikan, serta kebudayaan masyarakat, dan tentunya tidak lupa kondisi keberagamaan di tengah masyarakat itu sendiri.

1) Gambaran Perekonomian dan Mata Pencaharian

Secara umum, Desa Sarirogo memiliki tingkat kesuburan tanah yang cukup baik. Hal itu terbukti dengan adanya aneka tanaman yang tumbuh subur di Desa tersebut. Terbukti juga dengan perkembangan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Please purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark.

pertanian yang semakin meningkat setiap tahunnya. Penyusunan pola tanam masyarakat terstruktur sebanyak dua kali dalam setahun. Selain itu, prasarana irigasi berupa bendungan atau DAM yang digunakan oleh masyarakat luas juga menjadi bukti bahwa pertanian di Desa Sarirogo masih menjadi harapan penghidupan masyarakatnya.

Selain pertanian, di Desa Sarirogo juga berkembang home industri (usaha kecil di rumah), seperti kerajinan bambu, gelang pernik, warung buah, camelan ketan, warung aneka gorengan, dan lainnya. Dengan begitu, dapat diketahui bahwa mata pencaharian masyarakat di desa Sarirogo sangat variatif. Untuk lebih jelasnya berikut penulis jelaskan dalam tabel[73]:

Tabel VI: Mata Pencaharian dan Klasifikasi Penduduk

1	Petani	57 keluarga
2	Pedagang	160 orang
3	Pegawai Negeri Sipil	240 orang
4	Abri	43 orang
5	Wiraswasta	47 orang
6	Pelajar	730 orang
7	Mahasiswa	220 orang
8	Guru	41 orang
9	Tenaga medis	2
10	Jasa angkutan	20 orang

[73] Hasil monografi dan profil desa Sarirogo Sidoarjo tahun 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Please purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark.

2) Gambaran Pendidikan

Sebagaimana Desa lainnya, jenjang pendidikan masyarakat di Desa Sarirogo sangat variatif. Orang-orang tua yang berumur 70 tahun atau lebih rata-rata awam dan buta huruf. Sedangkan yang lainnya beragam, mulai dari SD, SLTP, SMA, Diploma, D2, Sarjana strata 1, dan S2. Sampai saat ini, yang belum ada masyarakat yang berpendidikan sampai jenjang doctoral (S3).

Namun dalam beberapa tahun terakhir, menurut laporan beberapa waega, terjadi peningkatan yang pesat. Namun data yang didapat oleh penulis di sini hanyalah satu dekade, karena ada pergantian kepala desa. Dan kepala desa yang baru belum menyusun secara lengkap data-data desa. Untuk lebih jelasnya, berikut penulis jelaskan dalam tabel:

Tabel VII: Pendidikan Penduduk Desa Sarirogo

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1	SD	358 orang
2	SLTP/MTS	79 orang
3	SMA	398 orang
4	Diploma 1	5 orang
5	Diploma 2	3 orang
6	Diploma 3	-
7	Strata 1	162 orang
8	Strata 2	4 orang
9	Doktoral	-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Please purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark.

3) Data Penduduk

Menurut data sensus penduduk tahun 2010, jumlah penduduk Desa Sarirogo keseluruhan mencapai 3.079 jiwa, dengan perincian 1547 orang laki-laki dan 1532 perempuan. Adapun berdasarkan kartu keluarga, jumlah kepala keluarga mencapai 887 keluarga.[74] Data tersebut hingga tahun ini bisa saja berubah, namun perubahannya tidak terlalu pesat sehingga perubahan dimaksud tidak jauh berbeda.

4) Gambaran Kultural

Secara umum, kebudayaan masyarakat Desa Sarirogo menunjukkan adanya kerukunan antar sesama. Hubungan baik tersebut direpresentasikan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat yang saling menghormati satu sama lain. Jarang sekali ada percekcokan dalam masyarakat.[75] Ketika ada acara Desa, masyarakat secara keseluruhan sangat *guyub*. Misalnya ketika acara tahlilan, pengajian umum, PKK, dan lannya mayoritas masyarakat Sarirogo menghadirinya.[76] Hal inilah yang membedakan antara penduduk Desa dengan penduduk kota, dimana mereka hidup di keramayan kota dengan rumah megah tapi kehidupannya bersifat individualis. Jarang sekali *guyuban* antara yang satu dengan yang lainnya, itulah kota. Apalagi yang ada di perumahan.[77]

---

[74] Dokumen desa Sarirogo, hasil sensus penduduk tahun 2010

[75] Hasil wawancara dengan bapak Mustafa, salah satu warga desa Sarirogo, pada tanggal 15 November 2011, jam: 15.09 WIB.

[76] Hasisl wawancara dengan Husnan al-Qadar, salah satu putera KH. Mahfudz Yasir, pada tanggal 15 November 2011, jam: 15.50 WIB

[77] Hasil wawancara dengan KH. Mahfudz Yasir, pada tanggal 15 November 2011, jam: 16.35 WIB

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Please purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark.

Di Desa Sarirogo, masyarakat terbagi menjadi dua bagian, yaitu masyarakat asli dan pendatang. Ada ciri khas yang amat mencolok yang membedakan kedua bagian tersebut, yaitu bahwa masyarakat asli Sarirogo masih sangat kental dengan budaya kerukunan dan kebersamaannya, sedangkan pendatang lebih minim.[78]

5) Gambara Keagamaan Masyarakat

Secara keagamaan, masyarakat Desa Sarirogo mayoritas memeluk agama islam. Kenyataan itulah yang menjadi salah satu alasan bagi KH. Mahfudz Yasir untuk selalu berdakwah melalui jalur apapun asalkan bisa dan mampu.

Perkembangan religiusitas di Desa ini berkembang sangat pesat, terutama islam. Hal itu disebabkan adanya perkembangan peradaban yang semula hanya peradaban desa yang konservatif, menuju peradaban yang dinamis. Di samping itu, adanya banyak tokoh masyarakat yang mulai bermunculan di desa ini.

Menurutnya, agama islam di Desa ini merupakan agama 'sentral', agama terbesar. Artinya, agama islamlah yang memiliki banyak peran dalam kehidupan masyarakatnya. Oleh karenanya, harus dikembangkan (melalui dakwah) agar masyarakat juga ikut berkembang.[79] Berikut penulis paparkan tabel terkait keagamaan masyarakat:

[78] Ibid.
[79] Hasil wawancara dengan KH. Mahfudz Yasir, pada tanggal 19 November 2011, jam: 15.21 WIB

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Please purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark.

Tabel VIII: Agama Penduduk Desa Sarirogo

No	Agama	Jumlah
1	Islam	3015 orang
2	Protestan	41 orang
3	Katolik	16 orang
4	Hindu	5 orang
5	Budha	2 orang

B. Deskripsi Hasil Penelitian; Dakwah dalam Politik KH. Mahfudz Yasir

1. Biorafi KH. Mahfudz Yasir

a. Kelahiran KH. Mahfudz Yasir

KH. Mahfudz Yasir dilahirkan di Desa Luwung Sarirogo Sidoarjo, pada tanggal 13 Oktober 1952, hingga tahun ini umur beliau sekitar 60 tahunan. Beliau dilahirkan dari keluarga pesantren dari pasangan KH. Muhammad Yasir (yang merupakan putera dari kiai Abu Bakar-dengan Ny. Hj. Lami) dengan Ny. Hj. Nur Inten (putera Kiai Amari-Ny. Kartikah). Semua keluarga KH. Mahfudz Yasir, baik nenek, kakek dan orang tuanya merupakan penduduk asli, Luwung-Sarirogo Sidoarjo. Ahmad Jazuli menuturkan:

> *Mbah* Fudz[80]itu adalah asli Sarirogo, baik ayah beliau maupun ibu dan neneknya. Dari kecil beliau juga dibesarkan di desa ini, katanya sich..beliau hampir seumur dengan ayah saya.[81]

[80] Mbah Fudz adalah panggilan orang desa Sarirogo kepada KH. Mahfudz Yasir.
[81] Wawancara dengan Bapak Ahmad Jazuli seorang tokoh masyarakat dan anggota partai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Please purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark.

Pada masa kecil, KH. Mahfudz Yasir hidup bersama keluarga dan hidup sebagaimana anak kecil pada masanya. Dia bermain dengan teman-temannya dalam kesehariannya. Namun begitu, dia mendapatkan kontrol lebih dari sang ayah, pagi hari harus belajar ngaji dulu, dan habis shalat ashar tidak boleh keluar rumah sebelum *nyetor* bacaan al-Qurannya. Artinya, benih-benih pendidikan sudah mulai ditanamkan oleh keluarganya.

Setelah ayahandanya meninggal dunia, KH. Mahfudz Yasir masih terbilang muda, umurnya sekitar 29 tahunan. Meninggalnya sang ayah sekaligus merupakan bukti penyerahan 'tampuk' kekuasaan pesantren di pangkuannya, karena dia meruapakan anak tertua laki-laki. Selama itu pulalah, KH. Mahfudz Yasir mulai mengurus pesantren dan menatanya sesuai dengan kapasitas keilmuan yang dimilikinya.

Dalam meneruskan perjuangan ayahandanya, KH. Mahfudz Yasir dibantu oleh istrinya yaitu Ny. Hj. Khalifah. Beliau menikah pada tahun 1982-an ketika berumur 30 tahunan. Dari pernikahannya itulah KH. Mahfudz Yasir dikaruniai tiga orang putera, Imamatur Rosyidah, Hasan al-Qodar, dan Moh. Husain al-Ghazali.[82]

b. Pendidikan KH. Mahfudz Yasir

Sebagaimana orang pesantren pada lazimnya, KH. Mahfudz Yasir menempuh pendidikan secara formal dan nonformal. Secara nonformal, beliau telah mendapatkan pendidikan secara langsung dari keluarganya, utamanya ayahandanya. Semenjak kecil, beliau mendapat bimbingan langsung dari

[82] Hasil wawancara dengan KH. Mahfudz Yasir, pada tanggal 19 November 2011, jam: 15.40 WIB

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Please purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark.

kedua orang tuanya khususnya tentang ilmu agama dan etika. Apalagi ayahandanya memang terkenal ketat dalam menjaga pendidikan anak-anaknya. Berbagai aturan terkait dengan pendidikan sudah diterapkan sejeak usia dini anak-anaknya. Contohnya, harus bangun pagi untuk belajar mengaji al-Quran dan menyetor pada waktu sore sebagaimana telah disebutkan dalam penjelasan sebelumnya. Hasan putera beliau mengatakan:

> Kata *umi,* kakek saya itu orang yang keras dalam membimbing anak-anaknya. Beliau sangat disiplin dalam waktu, sehingga kalau sudah sampai waktu untuk ngaji, ya harus ngaji, *gak* boleh kemana-mana. Kalau melanggar aturan pasti ada hukumannya. Sikap itulah yang juga digunakan oleh Abah saya ke semua anak-anaknya. Abah juga sangat ketat dan disiplin dalam mengatur waktu.[83]

Sedangkan pendidikannya secara formal, beliau masuk pendidikan formal pada usianya yang ke tujuh tahun di Sekolah Dasar (SD) Sarirogo. Setelah selesai sekolah dasar, beliau tidak melanjutkan ke jenjang berikutnya. Sehingga ijazah SMP dan SMA-nya baru didapat setelah mengikuti paket *wustha* (setara tingkat menengah). Namun demikian, secara kilmuan—khusussnya ilmu agama—beliau tidak diragukan lagi karena sejak dini sudah mendapatkan dalam keluarganya.

Untuk memperdalam ilmu keagamaannya, KH. Mahfudz Yasir muda berpindah-pindah dari pondok satu ke pondok yang lainnya. Beberapa pesantren ternama di Sidoarjo hampir seluruhnya pernah didatanginya. Sebut saja pondok pesantren Sono Sidokerto Buduran, al-Khoziny Buduran, Raudatul Ulum Candi, al-Falaq Ploso Kediri, Bahaudin Sepanjang, Darul

[83] Hasil wawancara dengan Hasan al-Qodar, salah satu putera KH. Mahfudz Yasir pada tanggal 22 November 2011, jam 04.00 Wib.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Please purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark.

Ulum Paterongan Jombang, dan terakhir di salah satu pondok pesantren di Tulungagung. Terkait dengan itu, Mustafa menuturkan:

> Menurut saya, *kalo* secara keilmuan beliau mungkin mendalam ya, soalnya beliau pindah pondok terus, mulai dari Buduran ke Candi ke Sepanjang ke Kediri dan yang saya *tau* juga ke Jombang.[84]

Setelah menyelesaikan pendidikan pondok di beberapa pesantren tersebut, KH. Mahfudz Yasir memutuskan untuk pulang dan membantu orang tuanya dalam mengembangkan pondok pesantren yang digagasnya. Bersamaan dengan itu pula, KH. Mahfudz Yasir sudah memulai misi dakwahnya di Desa Sarirogo. Berawal dari menghadiri acara-acara pengajian di Desa, kemudian akhirnya beliau juga menjadi pengisi acaranya. Sejak saat itulah, beliau mulai 'dihitung' oleh masyarakat dan dikenal sebagai seorang da'i yang tidak henti-hentinya menyebarkan ilmu dan memperluas agama islam.

c. KH. Mahfudz Yasir Masuk dalam Politik

Pada awalnya, KH. Mahfudz Yasir kurang simpati dengan urusan politik. Beliau menuturkan:

> Awalnya saya kurang senang dengan urusan politik, sebab saya melihat politik didominasi oleh urusan kekuasaan dan jabatan. Di samping itu, politik bisa dengan mudah menghalalkan segala cara dan mengubah persahabatan menjadi permusuhan. 'politik itu hakikatnya media untuk mengayomi masyarakat dan memperbaiki negeri ini. Tapi kenyataannya, politik menjadi alat untuk merebut kedudukan yang tinggi, memperkaya diri, mengelabuhi rakyat, dan menodai agama'[85] begitulah pernyataan KH. Mahfudz Yasir.

---

[84] Hasil wawancara dengan Mustafa (warga) pada tanggal 22 November 2011.
[85] Hasil wawancara dengan KH. Mahfudz Yasir pada tanggal 19 November 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Please purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark.

Walaupun begitu, tapi akhirnya pada tahun 1993 KH. Mahfudz Yasir memutuskan diri untuk masuk dalam partai politik, tepatnya di partai persatuan pembangunan (PPP). Di partai ini, beliau hanya menjadi anggota partai dan tidak masuk dalam struktur kepengurusan. Namun, ketika ada kegiatan atau acara partai beliau sering kali menghadirinya. Pada tahun 1998, di umur beliau yang ke 46, beliau bersama beberapa kiai lainnya bergabung dengan partai baru yang didirikan oleh ulama NU yaitu partai kebangkitan bangsa (PKB). Di partai ini, beliau sempat menjadi pengurus ranting Sarirogo dan ikut aktif dalam berbagai acara dan kegiatan yang diadakan oleh partai.

Menurutnya, terjun ke dalam partai politik bukan dengan tangan hampa. Akan tetapi, banyak tujuan yang ingin dicapai oleh beliau. *Pertama,* adalah memperbaiki kehidupan masyarakat sebab kehidupan mereka saat ini sudah sangat memeperihatinkan disbanding Negara-negara berkembang lainnya. Kemiskinan terus melonjat, pengangguran semakin banyak, ditambah juga dengan perpolitikan yang kurang memuaskan hati masyrakat. Alih-alih atas nama rakyat tapi yang terjadi justeru mengelabuhi rakyat. *Kedua,* menegakkan agama Allah. Artinya, masuk dalam politik tidak berniat dengan lainnya tapi untuk Allah (*lillahi ta'ala*). Dengan begitu, urusan politik bukan hanya pertanggung jawaban dengan manusia, tapi dengan Tuhan juga. *Ketiga,* berdakwah. Tujuan ini tidak kalah pentingnya dari tujuan yang sebelumnya. Karena tujuan ini berkaitan dengan penyebaran agama. Menurut penuturannya:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Please purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark.

> …ayah saya pernah berpesan bahwa agama hanya akan tersebar dengan dakwah, dakwah akan berjalan dengan semangat kerja, dan semangat akan terjaga dengan kesadaran diri.[86]

Dari penjelasan tersebut jelas bahwa KH. Mahfudz Yasir dalam politik tidak melepas dirinya sebagai seorang da'i. Pesan yang diajarkan ayahnya untuk selalu berdakwah tetap dipegang teguh walaupun beliau sedikit disibukkan dengan urusan politik. Bahkan, dalam kesempatan yang berbeda politik menurutnya dapat dijadikan sebagai media untuk membumikan nilai-nilai agama islam. Dalam kaitan ini, menurut beliau, semua keputusan dan kebijakan yang diambil dalam partai seharusnya didasarkan pada nilai-nilai agama di samping juga memperhatikan nilai-nilai sosial.

Pada tahun 2006, KH. Mahfudz Yasir kembali beralih ke partai politik lain yaitu parta kebangkitan ulama nasional (PKNU). Alasan beliau adalah agar dakwahnya dapat berkembang pada wilayah yang lebih luas. Di samping itu, menurutnya, berdakwah di dalam satu wilayah akan membuatnya jenuh baik pada dirinya maupun pada masyarakat.

Ketika beliau ditanya apakah perpindahannya ada kaitannya dengan konflik internal yang terjadi di tubuh PKB?, beliau menjawab: ya memang ada tapi tidak banyak, saya melihat sudah tidak ada keseimbangan di tubuh partai itu. Di samping juga, beberapa ulama yang merupakan guru beliau yang turut mendirikan partai PKNU, seperti KH. Faqih Langitan Tuban.[87] Di partai inilah beliau melanjutkan misi dakwahnya melalui jalur politik hingga saat ini.

---

[86] Hasil wawancara dengan KH. Mahfudz Yasir pada tanggal 19 November 2011.
[87] Hasil wawancara dengan KH. Mahfudz Yasir pada tanggal 19 November 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Please purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark.

d. Peran politik KH. Mahfudz Yasir

Perlu diakui bahwa keterlibatan kiai dalam politik hakikatnya bukan hal yang baru dalam sejarah umat islam. Sejak zaman nabi hingga sekarang, kiai sudah memegang peranan penting dalam arena politik. Di Indonesia, kiai terjun ke dalam politik (praktis)—khususnya kiai NU—karena memandang bahwa antara agama dan politik adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Buktinya, sampai detik ini, kiai yang masuk dalam partai politik semakin banyak.[88]

> Itulah sebabnya keberadaan kiai di Indonesia selalu dapat ditemukan dan selalu mewarnai panggung politik nasional, daerah maupun lokal. Hal tersebut tidak lain karena sosok kiai (termasuk saya/KH. Mahfudz) memiliki multi peran dalam masyarakatnya. Kiai, di samping menjadi pelaksanana dan pemibimbing masyarakat untuk selalu melaksanakan dan mentaati ajaran agama, juga menjadi pemimpin, *public figure*, penggerak, dan bahkan perantara partai politik tertentu.[89]

Terkait dengan perannya dalam politik, secara spesifik KH. Mahfudz Yasir membaginya menjadi dua yaitu: struktural dan nonstruktural, beliau menuturkan:

> ….ya secara struktural saya itu anggota partai dan secara otomatis saya harus mengikuti semua acara dan program partai, seperti rapat, kampanye, bimbingan masyarakat, dan banyak lagi yang lainnya. *Kalo* secara nonstruktural artinya saya tetap dalam kapasitas orang partai tapi melaksanakan sesuatu yang di luar program partai itu sendiri, misalnya menghadiri undangan forum atau acara desa.[90]

Menurut pengakuan Inaroh, dikatakan bahwa KH. Mahfudz Yasir tetap secara konsisten mengikuti acara-acara partai politik. Beliau sering kali ikut

[88] Hasil wawancara dengan KH. Mahfudz Yasir pada tanggal 18 Februari 2012.
[89] Hasil wawancara dengan KH. Mahfudz Yasir pada tanggal 23 Februari 2012.
[90] Hasil wawancara dengan KH. Mahfudz Yasir pada tanggal 22 November 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Please purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark.

andil dan berperan serta dalam kegiatan-kegiatan politik baik dalam lingkup desa maupun yang lebih luas. Lebih jelasnya dia menuturkan:

> Mbah Fudz itu orangnya tetap berpenampilan biasa, walaupun dia sekarang sudah aktif dalam banyak kegiatan, termasuk dalam politiknya. Yang saya tahu, beliau itu disiplin dalam politiknya.

Penjelasan tersebut menjadi bukti bahwa KH. Mahfudz Yasir memang memiliki peran aktif dalam politik, khsusnya di desa Sarirogo Sidoarjo, baik itu peran secara formal maupun secara nonformal. Peran itu bukan hanya berbentuk wacana tapi juga dalam tataran praktisnya.

Namun demikian, juga terjadi perbedaan pandangan di tengah masyarakat terkait dengan peran politik KH. Mahfudz. Ada sebagian masyarakat yang mengatakan bahwa beliau kurang berperan dalam politik sebab beliau lebih aktif sebagai da'i dan pengasuh pesantren. Shofiyah mengatakan:

> *Mbah* Fudz itu yang saya tau adalah penceramah dan pengasuh pesantren bukan orang politik.[91]

Terlepas dari perbedaan tersebut, yang jelas bahwa KH. Mahfudz memiliki peran politik di Desa Sarirogo. Terlepas apakah peran beliau diakui oleh masyarakat atau tidak. Karena secara jelas beliau telah menuturkan sendiri terkait dengan peran politik beliau.

e. Relasi Agama dan Politik menurut KH. Mahfudz Yasir

Berbicara tentang relasi antara agama dan politik, KH. Mahfudz Yasir memiliki pandangan bahwa antara keduanya memiliki keterkaitan yang sangat

[91] Hasil wawancara dengan Shofiyah pada tanggal 21 Februari 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Please purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark.

kuat dan tidak bisa dipisahkan. Pandangan demikian, merupakan pandangan umum orang-orang ahlus sunnah waljamaah, utamanya Nahdlatul Ulama (NU). Menurut penuturan beliau:

> Jika berbicara tentang islam, kita harus ingat bahwa itu adalah agama yang utuh, tidak hanya mengatur hubungan individu dengan tuhannya saja, akan tetapi seluruh aspek dari kehidupan manusia berada di bawah pengaturan Islam termasuk dalam hal ini politik, maka akan kita lihat relasi yang cukup erat antara keduanya, yaitu sebuah relasi yang tidak bisa dipisahkan.[92]

Lebih jelas lagi, dalam kesempatan yang berbeda beliau mengatakan terkait dengan hal itu:

> Aturan atau hukum dalam Islam secara global diklafikasikan pada dua kelompok. *Pertama*, hukum-hukum yang mengatur persoalan individu, yaitu mengenai keyakinan seseorang akan hal-hal yang darurat dalam din serta tugasnya sebagai seorang mukalaf seperti sholat atau shaum, yang ini sifatnya sangat personal, walaupun dalam hal ini ketika negara memfasilitasi hal-hal yang menunjang pelaksanaan hukum di atas akan sangat berpengaruh terhadapnya. *Kedua*, hukum-hukum ijtima'i (sosial masyarakat) seperti politik, ekonomi, budaya, diyat, qishas, hukum pidana, boleh tidaknya bekerjasama dengan pemerintahan dzalim, membela negara, politik luar negeri.[93]

Kalau dilihat dari pembagian hukum di atas, maka politik termasuk salah satu di dalamnya, dalam hal ini menjadi bagian dari hukum *ijtima'i* (social). Karena ia merupakan salah satu sisi dari kehidupan manusia, maka politik dalam Islam adalah politik yang tidak keluar dari nilai-nilai dan aturan main Islam, sehingga politik bisa menjadi media atau alat untuk mengantarkan manusia kepada tujuan dari penciptaannya.

---

[92] Hasil wawancara dengan KH. Mahfudz Yasir pada tanggal 22 Februari 2012.
[93] Hasil wawancara dengan KH. Mahfudz Yasir pada tanggal 17 Januari 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Please purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark.

Dalam Islam, *siyasah* (politik) tidak bisa dipisahkan dari din (agama), dan agama tidak bisa dipisahkan dari politik.Ketika politik dipisahkan dari din maka jadilah ia politik setan, politik yang tidak mengindahkan nilai-nilai kebenaran dan politik yang ditujukan bukan untuk kemaslahatan umat manusia. Sebaliknya ketika *din* (agama) dipisahkan dari *siyasah* (politik), maka lahirlah *din* yang tampil secara kerdil serta sangat terbatas dan hanya akan ada di masjid-masjid dan mushola serta di tempat berkontemplasinya para sufi saja.

Dengan begitu, menurut KH. Mahfudz Yasir, agama dalam politik merupakan landasan moral. Dalam artian, agama adalah pilar yang menjadi sandaran dalam berpolitik. Menurut penuturan Ahmad Jazuli:

> Saya pernah dibilangan oleh mbah Fudz begini: agama tanpa politik itu akan rapuh dan politik tanpa agama akan buta. Lihat saja masa nabi dan para sahabat, mereka itu beragama sekaligus berpolitik, berpolitik sekaligus beragama.[94]

Perlu ditegaskan di sini bahwa semenjak arus besar modernisasi yang dilengkapi dengan paham sekularisme mengguncang kehidupan masyarakat, dengan sendirinya agama mulai teralienasi dari ruang publik. Paham kebebasan yang dikawal anak zaman pencerahan tidak hanya meminggirkan peran agama tetapi juga menjadikan agama sebagai objek utama gugatan rasio manusia. Di tengah masyarakat, otoritas penuh agama dalam mendakwakan moral, norma, dan aturan mulai terpinggirkan.

Dalam arena politik agama yang sering kali menawarkan nilai-nilai kudus dan idealis dipandang tidak *compatible* dengan hukum politik riil yang

[94] Hasil wawancara dengan Ahmad Jazuli pada tanggal 18 Februari 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Please purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark.

berorientasi kekuasaan. Nilai kejujuran, pemaaf, dan penuh kasih sayang yang menjadi pesan agama dianggap cermin keluguan sikap politik. Sehingga pemisahan agama dan politik ini pun berakibat pada pemisahan antara moral dan politik.

Perdebatan moral dan politik sudah menjadi wacana klasik yang masih menarik untuk diperbincangkan. Haruskah moralitas mengontrol politik atau justru moral harus tunduk kepada kepentingan politik?. Terkait dengan hal ini KH. Mahfudz Yasir mengatakan:

> …kita itu tidak boleh berfikir terbalik. Agama itu adalah sumber moral, sedangkan politik hanya bagian kecil dari agama. Dengan begitu, jelas bahwa politik harus tunduk pada agama, bukan sebaliknya, agama yang tunduk pada agama. Karena jika demikian, agamalah yang disesuaikan dengan politik, atau moralitas yang dicocokkan dengan politik. Itulah paradigma berfikir yang salah.

Lebih dari itu, beliau menjelaskan secara jelas:

> Ini lagi..ketika seseorang menjadikan politik sebagai landasan berfikir dan bukan agama, maka bisa saja seorang harus memberikan kesan di depan rakyat bahwa ia seorang yang lembut, pemurah, bahkan agamais. Namun ia pun dapat berbuat jahat dan mengabaikan rasa sayang dan moralitas jika diperlukan. Itu sebabnya, karena dalam aturan dalam dunia politik bisa saja berubah dengan cepat, tanpa mengenal apapun.[95]

Korupsi, kolusi, menjadi obrolan ringan yang selalu diperbincangkan di tingkat elite, seolah-olah mereka (para elite) tetap memihak kepada rakyat. Penipuan dan bahkan penggadaian hukum menjadi warna kental perpolitikan bangsa Indonesia.

[95] Hasil wawancara dengan KH. Mahfudz Yasir pada tanggal 22 Januari 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Please purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark.

Tidak dapat disangsikan lagi bahwa politik amoral akan menjadi momok menakutkan dan ancaman buruk bagi masa depan bangsa. Menyadari hal itu maka dibutuhkan suatu tatanan moral yang dapat membentengi politik bangsa.

Moral *society* dan *ethical state* yang pernah didambakan dapat menggantikan agama terlihat nihil dan utopis ketika menyikapi persoalan 'cacat moral' kaum negarawan dan para politikus. Gagalnya moralitas formal seperti itu disebabkan ia tidak mempunyai daya imperatif yang kuat dan bisa membentuk orang yang konsisten dan masyarakat yang konsisten seperti layaknya kekuatan agama yang sangat lekat dalam masyarakat.

Beda halnya dengan agama, menurut KH. Mahfudz bahwa:

> Nilai-nilai agama oleh pengikutnya dianggap sebagai wujud dari hal yang transenden dan bersifat universal mempunyai daya ikat yang kuat dan mampu menundukkan ketaatan masyarakat. Tanpa maksud bernostalgia dengan zaman keemasan agama, tampaknya kita harus kembali mengajak agama untuk berperan lagi dalam menyikapi moralitas politik bangsa. Ada sebuah buku, disitu dijelaskan bahwa mengapa sering kali setiap tindakan politik negara harus dibayar dengan ongkos mahal dari ribuan korban jiwa manusia, karena nilai moral agama telah dikesampingkan dan tidak lagi menjadi ruh dalam pengambilan kebijakan negara.[96]

Dengan demikian, teladan nabi dalam semua tingkatan kehidupan beliau selayaknya menjadi contoh teladan yang ditelusuri oleh semua umatnya sekaligus mengaplikasikannya dalam kehidupan masa kini. Tentunya, dengan melakukan perubahan dan penyesuaian dengan kondisi dan lingkungan yang ada saat ini. Bukan hanya itu, praktik politik yang dilakukan oleh sahabat, tabiin dan masa setelahnya, harus dijadikan contoh dalam aplikasi politik saat

[96] Hasil wawancara dengan KH. Mahfudz Yasir, pada tanggal 22 Januari 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Please purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark.

ini. Dengan catatan, politik yang sesuai dengan agama sedangkan yang tidak sesuai harus diteliti dan disesuaikan dengan nilai-nilainya.

f. Pemaduan Politik dengan Nilai Agama: Ciri khas KH. Mahfudz Yasir dalam berpolitik

Para tokoh politik memiliki karakternya masing-masing, dimana antara yang satu dengan tokoh lainnya dapat saja berbeda, yang disebabkan oleh banyak faktor. Dalam kaitan ini, KH. Mahfudz Yasir juga memiliki ciri khas terkait dengan lakon politik yang dilakoninya. Salah satu ciri politik beliau adalah mampu mengimbangi politiknya dengan nilai-nilai agama. Hal itu tidak lepas dari pandangan beliau tentang relasi agama dan politik.

Nilai-nilai agama seperti toleransi, keadilan, kejujuran, musyawarah dan yang lainnya kerap kali mewarnai kiprah politik beliau. Terkait dengan hal ini, Ahmad Jazuli mengatakan bahwa:

> …*Mbah* Fudz itu bisa memposisikan agama secara tepat dalam politiknya. Sehingga, perjalanan politiknya sesuai dengan nilai-nilai agama. Beliau itu orangnya jujur, tidak mau memulai rapat kecuali sudah terkumpul semua anggota, dan melarang tindakan anarkis dalam politik.[97]

C. Analisis Data

1. Analisis atas Peran politik KH. Mahfudz Yasir

Idealnya, sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat luas, keterlibatan kiai dapat memberikan perubahan yang lebih baik bagi kehidupan bangsa dan perbaikan Negara ini. Politik moral yang diusung kiai diharapkan

[97] Hasil wawancara dengan Ahmad Jazuli pada tanggal 20 Januari 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Please purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark.

mampu mencipta hegemoni, meminjam istilah Gramsci, yang positif. Dalam artian, kiai memang berpengaruh signifikan merubah perilaku politik bangsa dan berpengaruh juga atas kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak merakyat.

Banyak kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah hanya memihak segolongan tertentu (yang telah mapan), padahal mayoritas penduduknya sedang terpuruk di tengah kemiskinan, kelaparan, pengangguran, dan peminggiran sosial. Rakyat sedang dicekik, tetapi tidak pernah dibela. Para wakil rakyat yang sebelum terpilih berjanji akan memperjuangkan hak kaum kecil, ternyata lupa, duduk manis menikmati kue kekuasaan. "Turun gunung"nya para kiai membentuk partai bertugas mampu membela hak-hak rakyat tersebut. Tidak lain karena kiai adalah pewaris Nabi.

Nabi bukan sekedar pemimpin agama. Nabi berjuang dengan gigih melawan penindasan dan ketidakdilan. Dan memang fondasi dasar beragama adalah berbela kemanusiaan sebagaimana juga dilakukan para peletak fondasi agama dizaman klasik yang mewartakan agama adalah berbela rasa; mengedepankan cinta, keadilan, kemanusiaan, kesederajatan, dan melampaui egoisme dan egosentrisme.

Para kiai, dalam terminologi Ali Syariati, merupakan nabi-nabi sosial yang mencerap jalan para nabi. Nabi tidak hanya mengkhotbahkan kebaikan dan kebajikan, namun juga memberikan teladan dalam medan sosial. Tugas kenabian tidak hanya melulu dilakukan melalui majelis, mimbar, dan podium,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Please purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark.

tetapi juga aksi-aksi praksis, baik melalui gerakan sosial maupun gerakan politik.

Hal itulah yang juga dilakukan oleh KH. Mahfudz Yasir dalam politiknya. Karena sebagaimana yang dikatakan oleh beliau bahwa masyarakat itu tidak berubah dengan sendirinya tanpa ada orang yang berusaha untuk merubahnya, atau ada di antara mereka yang berusaha untuk merubah nasib dirinya.

Jika dilihat dari kacamata sosial, pandangan beliau sepadan dengan pendapat orang-orang penganut fungsionalisme-struktural. Mereka berpandangan bahwa masyarakat antara satu dengan lainnya memiliki ikatan struktural dimana setiap individu memiliki fungsinya sendiri-sendiri. Fungsi-fungsi tersebut jika tidak berfungsi salah satunya, dapat mematikan sistem yang lainnya.

Dengan begitu, KH. Mahfudz Yasir sebagai tokoh yang dipandang oleh masyarakatnya merupakan salah satu elemen sistem yang mengerjakan fungsinya dengan baik, dengan tujuan untuk memperbaiki dan menyeimbangkan jalannya sistem masyarakatnya.

Dari sudut pandang yang berbeda, keterlibatan KH. Mahfudz Yasir dalam politik dapat dikatakan sebagai kesadaran beliau untuk memperbaiki kehidupan masyarakat dan bangsa, khususnya di Desa Sarirogo. Beliau adalah aktor masyarakat yang mampu menggerakkan sistem yang terjalin di masyarakatnya. Dari sudut pandang ini, keterlibatan beliau sangat sesuai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Please purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark.

dengan apa yang dikatakan oleh Max Weber, Mac Iver, dan Parson dalam teori aksinya bahwa:

1. Tindakan manusia muncul dari kesadarannya sendiri sebagai subyek dan dari situasi eksternal dalam posisinya sebagai obyek.
2. Sebagai subyek manusia bertindak atau berperilaku untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Jadi tindakan manusia bukan tanpa tujuan.
3. Dalam bertindak manusia menggunakan cara, teknik, prosedur, metode serta perangkat yang diperkirakan cocok untuk mencapai tujuan tersebut.
4. Kelangsungan tindakan manusia hanya dibatasi oleh kondisi yang tidak dapat diubah dengan sendirinya.
5. Manusia memilih, menilai, mengevaluasi terhadap tindakan yang akan, sedang dan yang telah dilakukannya.
6. Ukuran-ukuran, aturan-aturan atau prinsip-prinsip moral diharapkan timbul pada saat pengambilan keputusan.
7. Studi mengenai antar hubungan sosial memerlukan pemakaian teknik.

Dengan begitu, peran politik kiai Mahfudz merupakan sesuatu yang baru jika dilihat dari kacamata sosiologi. Karena selama ini, peran politik sepertinya tidak memerhatikan kaidah-kaidah sosial, sehingga terkesan lebih cenderung pada politik kekuasaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Please purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark.

2. Analisis terhadap Pemikiran KH. Mahfudz Yasir tentang posisi agama dalam pandangan politik beliau.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa KH. Mahfudz Yasir berpandangan bahwa antara agama dan politik tidak dapat dipisahkan satu sama lain, toh walaupun keduanya adalah hal yang berbeda. Dalam hal ini, beliau berpandangan bahwa agama adalah landasan moral bagi politik karena agama yang mengatur semua kehidupan umat manusia tanpa terkecuali. Agama adalah landasan moral bagi politik. Politik tanpa agama akan cenderung berorientasi pada perebutan kekuasaan dan kesewenang-wenangan, tapi dengan landasan agama, politik akan lebih mementingkan prinsip-prinsip yang berbasis pada kemanusiaan (humanis).

Dalam pandangan ini, agama menurut KH. Mahfudz Yasir menjadi sebuah sistem makro yaitu sistem dunia yang mengatur semua masalah kehidupan, termasuk politik kiai. Agama dan politik memiliki fungsinya tersendiri, ketika salah satunya disalahgunakan maka akan terjadi ketidakseimbangan hidup. Oleh karenanya, menurut beliau antara keduanya harus dipadukan sehingga bisa beriring bersama, harmoni.

Oleh karena itu, kiai politik, termasuk KH. Mahfudz, perlu mempertanyakan setiap sistem yang berlangsung, tapi bukan membenci orang-orang yang terlibat dalam sistem tersebut. Denga demikian, pemahaman atas sistem politik, ekonomi, maupun ideologi menjadi sangat penting. Usaha untuk mengatasi penghancuran lingkungan, ketidakadilan, dan berbagai kesenjangan sosial, politik, dan ekonomi, misalnya, jelas menjadi tugas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Please purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark.

seorang kiai. Tapi juga tidak bias diabaikan bahwa setiap komitmen moral yang dilakukan sebagai usaha pembebasan penderitaan, sesungguhnya bersifat politis.

Mengatasi penderitaan memang merupakan komitmen moral, tapi melakukan perubahan struktural yang tidak demokratis agar rakyat terbebas dari struktur sosial yang menindas dan banyak menimbulkan penderitaan, maupun yang melanggengkan ketergantungan dan ketidak berdayaan mereka, merupakan keputusan politik. Jadi jelas, pembebasan penderitaan saat ini tidak dapat dipahami hanya dalam konteks pribadi, karena agama selain memberi sarana bagi pembebasan pribadi, ia juga harus dapat melapangkan jalan bagi pembebasan sosial dan lingkungan masyarakat.

Di sisi lain, politik mengatur relasi antar manusia; sedangkan agama merupakan relasi manusia dengan Tuhan, yang dinyatakan dalam berbagai bentuk. Keduanya mempunyai kesamaan, sekaligus memiliki berbagai perbedaan; namun, bisa saling mempengaruhi dan dipengaruhi. Kesamaan utama agama dan politik adalah peranan manusia; tanpa mereka keduanya tidak berarti. Manusia yang beragama (umat beragama), juga adalah mereka yang berpolitik; mereka yang berpolitik adalah umat beragama.

Walaupun demikian, seni dan cara memerintah secara politik, tentu saja berbeda dengan pola-pola kepemimpinan agama-agama. Sayangnya, perbedaan hakiki antara agama dan politik tersebut sangat tipis atau bahkan hampir tidak terlihat. Ada politisi yang menggunakan agama sebagai alat untuk mencapai kedudukan serta kekuasaan. Dan ada juga kiai yang memakai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Please purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark.

trik-trik politik untuk mencapai dan mempertahankan kepemimpinan terhadap umat.

Jika politisi menggunakan agama sebagai alat untuk mencapai kedudukan serta kekuasaan politik, maka hal itu menunjukkan ketidakmampuan dan ketidaktrampilan berpolitiknya. Ia hanya mempunyai motivasi untuk mencari untung dari kedudukan serta kekuasaan politik, dalam rangka memperkaya diri sendiri sekaligus mencari nama. Politisi seperti itu, tidak mempunyai kepekaan terhadap permasalahan dan pergumulan umat manusia atau masyarakat luas. Jika ada yang ia perjuangkan, maka hanya akan memperhatikan atau demi kepentingan orang-orang tertentu seperti mereka yang seagama dengannya.

Demikian juga jika kiai memakai trik-trik politik untuk mencapai dan mempertahankan kepemimpinan terhadap umat, maka ia sebetulnya tidak layak disebut sebagai kiai. Ia mempunyai pengetahuan dan pemahaman keagamaan yang dangkal; serta tidak memiliki kharisma sebagai pemimpin umat. Ia hanya mau menjadikan umat sebagai sapi perah untuk kepentingan diri sendiri; ia tidak peduli terhadap pentingnya pelayanan dan kesaksian kepada umat; yang ada padanya hanya nama dan kehormatan sebagai seorang pemimpin serta pemuka agama (kiai).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Please purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebelumnya dan sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka dapat ditari kesimpulan bahwa:

1. KH. Mahfudz Yasir memiliki peran yang sangat berarti dalam politik di Desa Sarirogo-Sidoarjo. Peran politik beliau setidaknya dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu: *pertama*, peran politik formal yang beliau sebut sebagai peran struktural. Dalam hal ini kiai berperan serta dalam setiap kegiatan dan program-program politik, termasuk juga program partai, seperti kampanye, rapat, dan mengikuti setiap pemutusan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah.
2. Antara agama dan politik menurut pandangan KH. Mahfudz Yasir tidak bisa pisahkan walaupun keduanya adalah hal yang berbeda. Keduanya harus dijalankan secara seimbang, karena keduanya adalah sistem yang terpadu. Apabila ada ketidakseimbangan antara keduanya maka akan terjadi ketidakseimbangan dalam aplikasi riil di masyarakatnya. Berkaitan dengan itu, menurutnya, agama adalah landasan moral bagi politik. Artinya, semua rencana dan program politik harus tetap didasarkan pada norma dan nilai agama, sehingga tujuan politik selaras dengan tujuan agama itu sendiri, *amar ma'ruf*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Please purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark.

nahi mungkar, meciptakan keadilan dan keharmonisan hidup masyarakatnya.

B. Saran-saran

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah penulis paparkan, maka terdapat beberapa saran dari penulis sebagai berikut :

1. Keterlibatan kiai dalam politik tidak perlu diperdebatkan, apalagi tentang boleh tidaknya, tapi yang perlu diperhatikan bagaiaman sekarang kiai yang terjun dalam politik dapat memainkan perannya secara positif dan optimal.
2. Dunia politik saat ini kelihatannya sudah menyimpang dari tujuan hakikinya. Hal itu terlihat dengan adanya fenomena-fenomena yang bertengangan dengan norma agama dan Negara, diaman hal itu dilakukan oleh para politisi. Dengan begitu, tidak salah jika kemudian ada upaya pemaduan antara politik dan agama. Agama dalam politik diharapkan akan bisa menghiasi politik dengan wacana Islami dalam penyelamatan manusia dari kejahilan dan mengamalkan amal ma'ruf nahi munkar.
3. Tempatkanlah agama dalam semua lini kehidupan sebagai landasan moral, yang mengajarkan *rahmatan lil 'alami.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Please purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark.

Lampiran-Lampiran

Gambar I

Foto KH. Mahfudz Yasir bersama Peneliti

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Please purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark.

Gambar II

Kediaman KH. Mahfudz Yasir tampak dari depan

Gambar III

Masjid KH. Mahfudz Yasir dalam proses rehabilitasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Please purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark.

Gambar IV

Profil desa Sarirogo

Gambar V

Plang Yayasan yang dikelola oleh KH. Mahfudz Yasir

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Please purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark.

Gambar VI

Balai desa Sarirogo

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Please purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Qadir Jailani, *Peran Ulama dan Santri*, Surabaya: Bina Ilmu, 1994.

Ahmad Patoni, *peran Kiai Pesantren dalam Partai Politik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

Antony Black, *Pemikiran Politik Islam; dari Masa Nabi hingga Kini*, Jakarta: Serambi Ilmu, 2006.

Bahtiar Effendi, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, Jakarta: Paramadina, 1998.

Charles, *Sosiologi Komunikasi Massa*, Bandung: Remaja Karya, 1998.

Cholid Nurbuko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 1997.

Delier Noer, *Pengantar Ke Pemikiran Politik*, Cet.I, Jakarta: Rajawali, 1983.

H.A.R Gibb dan JH Kramers, *Shorter Encydopaedia of Islam*, Cornell University Press, Ithaca, New York, 1953.

Hiroko Horikoshi, *Kyai dan Perubahan Sosial*, Jakarta: LP3ES, 1987.

Imam Suprayago, *Kyai dan Politik di Pedesaan (suatu kajian tentang Variasi dan bentuk Keterlibatan Politik Kyai).* Desertasi Doktor di Universitas Airlangga. 1997.

James Black, *Metodologi dan Masalah Penelitian Sosial*, Bandung: Erecso, 1992.

Jeje Abdul Rozak, *Politik Kenegaraan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001.

Jumhur dkk., *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah*, Bandung: Pustaka Ilmu, 1975.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Please purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark.

KH. Mustafa Bisri yang ditayangkan di TV9 Sembilan pada tanggal 23 November 2011, jam 15.30.

Lexy Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif,* Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2007.

Majalah Aula, *Peran Politik Kiai,* ditulis oleh Afifullah Hasan, November 2008.

Maskuri Abullah, *Ulama dan Politik,* , Jakarta: Kompas Media, 2000.

Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik,* Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2008.

Muhammad Azhar, *Filsafat Politik,* Jakarta: Raja Grafindo, 1997.

Muhammad Dhiauddin, *Teori Politik Islam,* Jakarta: Gema Press Insani, 2001.

Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan,* Bandung: Rosda Karya, 2005.

Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif,* Bandung: Tarsito, 2003.

Noeng Muhadjir, *Motode Penelitian Kualitatif,* Jogjakarta: Rakesarsin, 1996.

Peter Salim dan Yeni Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer,* Jakarta: Modern English Press, 1991.

Posmo, *Peran Kiai,* edisi 268, terbit pada tanggal 2 Juni 2004.

Pradjarta Dirdjosanjoto, *Memelihara Umat: Kyai Pesantren-Kyai Langgar di Jawa*. Yogyakarta: LKiS, 1999.

Pradjarta Dirjosanjoto, *Memelihara Umat, Kiai Pesantren – Kiai Langgar di Jawa*, Jogjakarta: LKIs, 1991.

Pradjarta Dirjosanjoto, *Memelihara Umat, Kiai Pesantren – Kiai Langgar di Jawa*, Jogjakarta: LKiS, 1991.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Please purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark.

Ralph Linton, *Sosiologi suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali, 1984.

Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Grasindo, 1992.

Ritzer Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta: Kencana, 2006.

Rolan Syafiie, *Agama dan Politik*, Bandung: Pustaka Politika, 2003.

Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: Gramedia, 1994.

Soerjono Soekanto, *Memperkenalkan Sosiologi*, Jakarta: Rajawali, 1982.

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV Alfabeta, 2009.

Suhaidi RB, *Menelisik Peran Politik Kiai*, Majalah Turas, 1999.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

Sulistiyati Ismail, *Pengantar Ilmu Politik*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1989.

Tim Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, Surabaya: Arkola, 1997.

Usman Sunyoto, *Sosiologi: Sejarah, Teori dan Metodologi*, Yogyakarta: Cired, 2004.

Zamakhsyari Dofier, *Tradisi Pesantren*, Jakarta: LP3Es, 2008.

www.sunan-ampel.ac.id

www.tirmidzi85.blogspot.com

www.sumenep.go.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id